



GREAT Institute

GREAT THINKING, GREAT NATION

MEMBANGUN
KESADARAN RAKYAT
MEWUJUDKAN
KEADILAN SOSIAL

GRAND Launching

3 Juni 2025

HABIS GELAP



GREAT Institute
GREAT THINKING, GREAT NATION

TERBITLAH TERANG



GREAT Institute

**Global Research on Economics,
Advance Technology, and Politics**

Sekapur Sirih

Dengan rasa syukur dan penuh semangat, kami meluncurkan GREAT Institute—sebuah lembaga *think tank* pendorong kemajuan pemikiran yang lahir dari denyut sejarah pergerakan, terutama semangat reformasi 1998 yang hingga kini masih menyala dalam dada para pendirinya.

Dipimpin oleh Dr. Syahganda Nainggolan dan didukung oleh para aktivis lintas generasi, lembaga ini hadir untuk menjawab tantangan kebangsaan melalui pendekatan riset yang progresif, ilmiah, dan berpijak pada nilai-nilai Pancasila.

Nama “GREAT” bukan sekadar simbol keagungan. GREAT adalah akronim dari *Global Research on Economics, Advance Technology and Politics*— pilar-pilar utama yang menjadi fondasi kajian kami. Dalam konteks dunia yang kian kompleks dan seringkali bias kepentingan, GREAT Institute memposisikan diri sebagai mitra kritis bagi para pemangku kebijakan, media, kalangan kampus, pelaku industri, serta rakyat yang mendambakan arah pembangunan yang adil, rasional, dan berbasis data.

Peluncuran ini bukan sekadar seremoni. Peluncuran GREAT adalah pernyataan sikap, bahwa gagasan harus kembali memimpin arah bangsa. Bahwa kebijakan publik harus kembali tunduk pada argumentasi ilmiah, bukan tekanan oligarki. Bahwa pembangunan Indonesia harus kembali berpihak pada kemanusiaan, bukan hanya pada statistik pertumbuhan.

Di tengah krisis kepercayaan terhadap institusi-institusi formal, kami percaya bahwa peran *think tank* independen sangat krusial. GREAT Institute hadir untuk menyuarakan suara yang sering dilupakan: suara nalar, suara rakyat, dan suara masa depan. Kami tidak hanya mengkaji, tapi juga terlibat. Tidak hanya menyusun *policy brief*, tapi juga terjun membangun jejaring—dari lokal hingga internasional.

Akhir kata, kami mengajak semua pihak—baik akademisi, aktivis, birokrat, jurnalis, maupun masyarakat luas—untuk bersinergi dengan kami. Mari menjadikan akal sehat dan keberanian moral sebagai kompas pembangunan bangsa.

Salam hangat dan penuh harap!



Sambutan Ketua Dewan Direktur

Kita hidup di zaman ketika suara akal sehat kerap dikalahkan oleh kebisingan propaganda, dan kebenaran dibungkam oleh kepentingan yang menyaru sebagai pembangunan. Indonesia berjalan cepat, namun arah tujuannya sempat kabur. Negara ini membangun jalan tol ke mana-mana, tetapi kehilangan peta nilai keadilan yang seharusnya menjadi kompasnya.

Dalam situasi seperti itulah GREAT Institute lahir. Bukan sebagai pelengkap formalitas demokrasi, melainkan sebagai ruang perlawanan intelektual. Sebuah rumah bagi nalar yang tak sudi tunduk pada kekuasaan yang memiskinkan pikiran.

Kami percaya, bangsa ini tak kekurangan sumber daya, tapi kehausan pada keberanian berpikir jernih. Tak kurang orang pintar, tapi langka yang berani merdeka dari ilusi kuasa dan kapital.

Kata GREAT bukan hanya soal akronim: *Global Research on Economics, Advance Technology and Politics*. GREAT adalah pilihan untuk tetap berdiri tegak ketika banyak yang memilih diam. Untuk tetap berpikir merdeka ketika tafsir kebenaran dimonopoli. Untuk tetap menulis, meneliti, dan menyebarkan ide, ketika ruang publik dibanjiri disinformasi.

Kami sadar, ini bukan jalan mudah. Tetapi seperti kata Sutan Sjahrir: “Hidup yang tidak dipertaruhkan tidak akan pernah dimenangkan.” Dan kehendak kami jelas—membela rakyat dengan akal, membangun negeri dengan gagasan, bukan basa-basi kekuasaan.

Terima kasih kepada semua yang percaya bahwa pikiran masih punya tempat di republik ini.

Dr. Syahganda Nainggolan

Ketua Dewan Direktur

Sambutan Ketua Dewan Penasihat

Dalam sejarah panjang bangsa ini, kerap kali keputusan penting diambil bukan karena kejernihan nalar, tapi karena desakan kuasa, tekanan asing, atau godaan sesaat. Itulah sebabnya negeri ini terus membangun, tapi tak pernah betul-betul utuh menjadi rumah yang adil bagi seluruh rakyatnya.

Di titik inilah kita membutuhkan *thinktank*—bukan sekadar sebagai pelengkap lembaga negara atau penyemarak diskusi publik, tetapi sebagai penjaga akal sehat republik. Sebuah ruang yang bersedia bertanya ketika banyak pihak memilih hanya membenarkan. Sebuah tempat yang berani berpikir panjang, ketika kekuasaan terlalu sibuk mengejar yang instan.

GREAT Institute lahir bukan dari rasa puas, tapi dari keresahan. Dari keyakinan bahwa pembangunan tanpa arah nilai hanya akan melahirkan kesenjangan. Kita tahu, seperti kata Vaclav Havel, *“The salvation of this human world lies nowhere else than in the human heart, in the human responsibility.”* Dan tanggung jawab itulah yang kini kami emban: menghadirkan riset yang jujur, ide yang strategis, serta keberanian untuk berkata apa adanya.

Saya percaya, jika bangsa ini ingin melangkah maju, maka pemerintah—siapa pun pemimpinnya—harus mau mendengar suara yang tak tunduk, tapi tulus. Suara yang tak menawarkan basa-basi, melainkan gagasan yang lahir dari nurani dan akal sehat.

Terima kasih kepada seluruh rekan yang telah membidani lahirnya GREAT Institute. Semoga rumah pikiran ini menjadi cahaya kecil yang menerangi jalan panjang kita menuju Indonesia yang lebih merdeka—secara ekonomi, teknologi, dan politik.

Moh Jumhur Hidayat
Ketua Dewan Penasihat



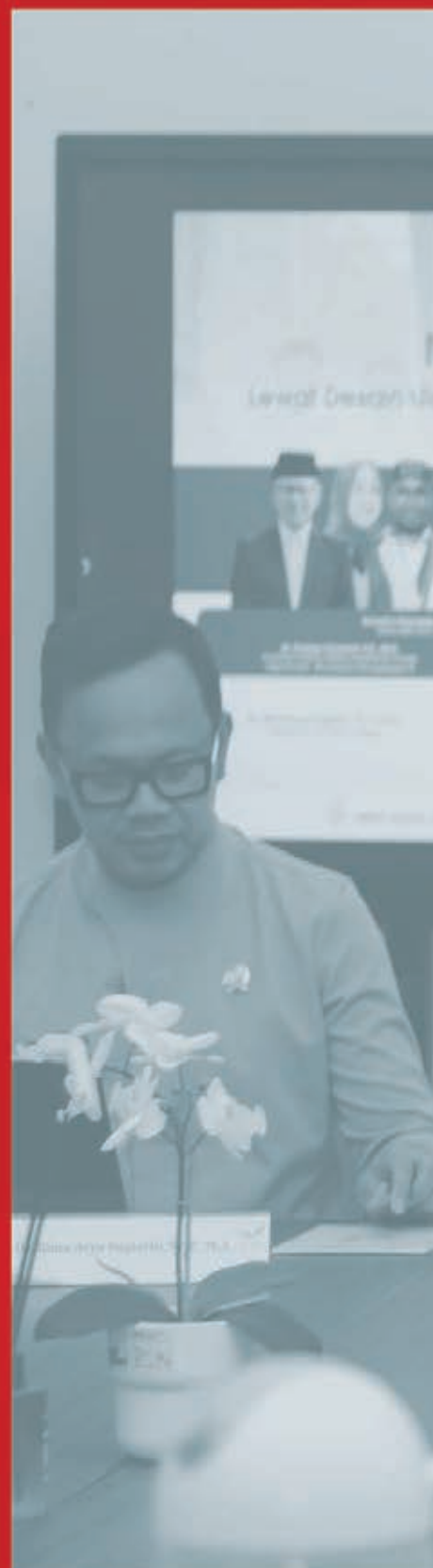


Daftar Isi

iii	Sekapur Sirih
V	Sambutan Ketua Dewan Direktur
Vi	Sambutan Ketua Dewan Penasihat
1	Focus Group Discussion
6	FGD Mencermati Arah Politik dan Diplomasi Prabowo di Timur Tengah dan Turki.
14	GREAT Lecture bersama Utkarsh Saxena Co-Founder dan CEO Adalat AI
16	FGD Prabowonomics di Era Tariff War
24	FGD Politik Energi: Menuju Swasembada Energi Melalui Teknologi Nuklir
36	GREAT Lecture Bersama Dr. Greg Poulgrain
42	FGD Mendorong Pemerataan Lewat Desain Ulang Hubungan Pusat-Daerah di Era Efisiensi Anggaran
46	Media Coverage
54	Penutup



GREAT Institute
GREAT THINKING, GREAT NATION



Focus Group Discussion



FOCUS GROUP DISCUSSION

Senin, 27 Januari 2025

Diskusi dengan Hatta Rajasa (Menkoperekonomian RI 2009 - 2014) tentang Pertumbuhan Ekonomi, Energi dan Pertambangan (Windfall tax dan DMO).



Para pendiri GREAT Institute dengan Bpk Muhammad Hatta Rajasa, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia 2009-2014 (kanan)

Jumat, 7 Februari 2025

Diskusi dengan Anthony Budiawan (Ekonom Erasmus University) membahas soal ketahanan moneter, penguatan nilai tukar dan Devisa Hasil Ekspor. Selain itu membahas terjadinya *crowding out effect* yang ditimbulkan oleh perebutan Dana antara surat utang Pemerintah dan BI.

Jumat, 7 Februari 2025

Audiensi dengan Prof Brian, Mendiktisaintek terkait pendidikan tinggi.



Syaganda Nainggolan, Ketua Dewan Direktur GREAT Institute (kiri), Moh Jumhur Hidayat, Ketua Dewan Penasihat GREAT Institute (tengah), dan Anthony Budiawan, Ekonom Erasmus University (kanan).



Audiensi dengan Prof. Brian Yulianto, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (tengah), Fandi Wijaya, pendiri GREAT Institute (kiri), dan Syaganda Nainggolan, Ketua Dewan Direktur GREAT Institute (kanan).

FOCUS GROUP DISCUSSION

Rabu, 12 Februari 2025

FGD membahas hubungan Indonesia dan Turki, Pertemuan Prabowo dan Erdogan. Pembahas Jumhur Hidayat, Nurhayati Assegaf (ex Ketua BKSAP), Zarmansyah (Pengamat dan Alumni Turki), Rizal (Pengamat Pertahanan Lesperssi dan Teguh Santosa (Pengamat Hubungan Internasional) menghasilkan tesis penguatan hubungan Indonesia dan Turki bagus secara politik melalui D8 dan OKI serta melalui ekonomi melalui MIKTA (Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki dan Australia) sebuah organisasi ekonomi negara-negara menengah lintas benua.



FGD dengan Bakir Pasaman (Ex Direktur Utama Pupuk Indonesia) dan Anthony Budiawan (Ekonom Erasmus Huis) membahas ketahanan Pangan melalui program Makmur yaitu pembangunan ekosistem Pangan dari Hulu ke hilir yang telah dijalankan oleh Kementerian BUMN. Program ini berhasil dalam meningkatkan produktivitas lahan sehingga perlu diperluas dan diperkuat.



Jumat, 21 Februari 2025

FGD membahas tesis Pemikir Perancis Louis Althusser bersama Andi Hakim (Ideolog KAHMI Jawa Barat) dan Ade Adam Nuh (Pensiunan ASN Senior/Dewan Mahasiswa Universitas Sam Ratulangi). Untuk mendukung target Pemerintahan Prabowo yang tinggi dalam waktu yang tidak terlalu panjang dibutuhkan model birokrasi yang ideologis sesuai tesis Althusser, Weberian (netral tak berpihak) atau entrepreneur birokrat. Kesimpulan diskusi ialah dibutuhkan birokrasi yang bersifat ideologis, kompeten dan profesional dalam mendukung pelaksanaan ide dan arahan dari Presiden Prabowo.

FGD dengan Hatta Rajasa (Mekopereekonomian 2009-2014) membahas proses perencanaan dalam pembangunan. Ketika periode tersebut menggunakan MP3EI. Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) ditetapkan pada tahun 2011 melalui Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011. Selain perencanaan yang baik, untuk membawa investasi asing masuk dengan menjaga kepastian hukum dan mengurangi korupsi. Ini penting di mata asing, karena investor besar yang masuk rata-rata merupakan emiten besar di negara nya dan mempunyai tata kelola korporasi yang harus dijaga.



DIPLOMASI PRABOWO, MIMPI GLOBAL SOUTH, DAN PENTINGNYA KOMUNIKASI POLITIK



Pada Focus Group Discussion (FGD) yang digelar di sebuah ruang bersahaja itu tensi intelektual mengalir deras. Para ilmuwan, diplomat, dan analis kebijakan luar negeri berkumpul dalam sebuah diskusi bertajuk “Mencermati Arah Politik dan Diplomasi Prabowo di Timur Tengah dan Turki.”

Forum tersebut bukan sekedar menyoal agenda kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Uni Emirat Arab, Turki, Mesir, Qatar, dan Yordania. Lebih dari itu, FGD menelisik pertanyaan besar yang menyelalap di benak banyak orang: ke mana sebenarnya Indonesia ingin dibawa di kancah global?

Ketua Dewan Direktur GREAT Institute, Syahganda Nainggolan, membuka diskusi dengan menekankan potensi Prabowo untuk tampil sebagai pemimpin baru dari kawasan *Global South*. Ia menyebut Pra-

si lebih sering dipertarungkan di ruang persepsi ketimbang meja negosiasi, narasi yang keliru bisa menggelamkan niat baik.

Suasana forum mulai menghangat ketika Dr. Teguh Santosa, Direktur Geopolitik GREAT Institute, berbicara. Dengan nada datar tapi argumentasi berlapis baja, ia menyodorkan tafsir realis atas dunia internasional yang disebutnya sebagai arena anarkis. Bagi Teguh, kesalahan besar Indonesia adalah berpindah ketergantungan dari satu hegemon ke hegemon lain.



bowo punya peluang besar untuk menggalang solidaritas negara-negara berkembang dan memberi arah baru dalam arsitektur dunia. Tapi Syahganda tidak berhenti di situ. Ada catatan tegas yang ia sisipkan: komunikasi.

“Komunikasi politik kita belum sepadan dengan langkah besar yang ingin ditempuh,” ujarnya singkat namun sarat peringatan. Di zaman ketika diploma-

“Antitesis dari ketergantungan bukan beralih kesetiaan,” ujar Teguh. “Antitesisnya adalah ketiadaan ketergantungan sama sekali.” Kalimat itu mengeras di udara seperti palu godam, mengingatkan bahwa kedaulatan bukan sekadar simbolik, melainkan soal relasi yang setara, tanpa subordinasi. Ia pun mengutip Kant: perdamaian hanya mungkin jika semua berdiri sejajar.



Syaganda Nainggolan, Ketua Dewan Direktur GREAT Institute (kiri) dan Dr. Nurhayati Assegaf, ex Ketua BKSAP (kanan)

Dr. Zarman Syah menambahkan dimensi historis dalam percakapan. Indonesia, katanya, punya “investasi lama dalam perdamaian dunia.” Sebuah modal diplomasi yang kerap dilupakan. Ia menegaskan bahwa misi luar negeri Presiden Prabowo seharusnya menyambung napas panjang diplomasi damai Indonesia, dan bukan sekadar seremonial. Diplomasi, kata Zarman, harus membawa hasil konkret, termasuk dalam ekonomi.

Diskusi itu menghadirkan tiga pemantik utama: Dr. Nurhayati Assegaf, Dr. Hilmy Bakar Almascaty, dan Dr. Teguh Santosa. Ketiganya memberi pembacaan mendalam atas relasi Indonesia dengan Timur Tengah dan Turki. Dr. Hilmy, dalam refleksi tajamnya, menyebut bahwa diplomasi sejati bukan hanya soal manuver politik, tetapi juga pertarungan nilai. “Tanpa wajah etik, diplomasi kehilangan legitimasi,” kata Hilmy.

Para penanggap lain tak kalah tajam. Dr. Indra Kusuma Wardhani dan Dr. Rizal Darmaputra menegaskan bahwa diplomasi Indonesia perlu menyentuh sisi konkret—ekonomi, teknologi, kerja sama industri. Bukan hanya parade protokoler. Sementara Prof. Iswandi Syahputra dan Dr. Rahmi Fitrianti menyerukan agar kekuatan lunak Indonesia—budaya, spiritualitas, dan gotong royong—diangkat ke panggung global sebagai senjata diplomasi yang sejati. “Sering kali kita lupa, nilai-nilai lokal adalah soft power yang paling tahan uji,” kata Iswandi.

Sikap Indonesia atas Palestina juga menjadi sorotan. Smith Alhadar dan Omar Thalib menekankan bahwa kunjungan Prabowo ke kawasan konflik tidak boleh netral-netral amat. “Dalam situasi ketidakadilan, netralitas adalah keberpihakan pada penindas,” kata Smith, menggemakan kutipan Desmond Tutu yang menggigit.

Suara lain datang dari Hanief Adrian, pengamat



geopolitik. Ia melihat bahwa diplomasi Prabowo tak boleh berhenti di gestur diplomatik. “Yang kita perlukan adalah sinergi antara diplomasi, ekonomi, dan pendidikan geopolitik untuk rakyat,” ujarnya. Diplomasi, dalam tafsir Hanief, bukan ranah elite semata, tapi soal pengaruh yang dirasakan oleh rakyat biasa di pasar, di kelas, di ladang.

Ir. Wahyono menimpali dengan keprihatinan: diplomasi luar negeri seringkali hanya dimengerti elite. Ia mengusulkan agar negara membuka kanal pendidikan publik tentang geopolitik agar rakyat memahami, bukan menebak-nebak, posisi Indonesia.

Menjelang akhir diskusi, moderator membacakan kutipan Edward Said: “*There is no power without knowledge, and no knowledge without power.*” Sebuah isyarat kuat bahwa diplomasi sejati bukan hanya milik istana dan kementerian, melainkan milik bangsa yang melek geopolitik.

Indonesia, dalam kalimat-kalimat yang tertinggal dari diskusi ini, tampak tengah menulis babak baru dalam politik luar negerinya. Tapi seperti kata Albert Camus, “*To be neither victim nor executioner requires a firm and relentless engagement.*” Maka pertanyaannya: apakah Indonesia memilih menjadi bangsa yang berjarak aman dari sejarahnya, atau tampil sebagai pelaku sejarah yang tahu ke mana hendak melangkah?

Satu hal yang tak bisa dibantah: forum ini bukan sekadar ruang debat. Ia adalah cermin. Dan seperti semua cermin yang jujur, ia menunjukkan wajah kita apa adanya—serta arah mana yang layak ditempuh.

Peserta FGD: Dr. Nurhayati Assegaf, Dr. Hilmy Bakar Almascaty, dan Dr. Teguh Santosa, Dr. Rizal Darmaputra, Dr. Zarmansyah, Dr. Indra Kusuma Wardhani, Dr. Rahmi Fitrianti, Prof. Iswandi Syahputra, dan Dr. Sudarto, juga Smith Alhadar, Omar Thalib, Dr (Cand.) Turino, Ir. Abdullah Rasyid, Ir. Wahyono, dan Hanief Adrian.@

Prabowo, Turki dan Isu Timur Tengah

Pada tanggal 9 April, 2025 Presiden Prabowo Subianto melakukan perjalanan diplomasi ke beberapa negara Timur Tengah dan Turki. Dalam Lawatan kali ini, Presiden Prabowo Subianto mengunjungi Uni Emirat Arab, Turki, Mesir, Qatar, dan Yordania dimana setiap kunjungan tersebut memiliki tujuan strategis untuk memperkuat hubungan bilateral, khususnya di bidang pertahanan, ekonomi, dan kemanusiaan.

Kunjungan ke Turki menjadi salah satu sorotan penting, di mana Presiden Prabowo bertemu langsung dengan Presiden Recep Tayyip Erdogan. Dalam pertemuan tersebut, kedua negara sepakat meningkatkan kolaborasi strategis, termasuk kemungkinan keterlibatan Indonesia dalam pengembangan jet tempur generasi kelima Turki, KAAN, serta pembangunan pabrik drone tempur Baykar di Indonesia.

Kerja sama dalam bidang pertahanan antara Turki dan Indonesia penting terutama dalam pembangunan industri militer. Indonesia dinilai bisa membangun kerja sama di bidang industri militer dengan Turki untuk memperkuat pertahanan dalam negeri. Walau di tengah renggangnya hubungan antara Turki dengan Barat, Presiden Recep Tayyip Erdogan dinilai kuat bisa membantu mendorong industri militer Indonesia, dan menjadikan Indonesia partner dagang baru bagi Turki.

Selain itu penting juga untuk diperhatikan tindaklanjut atas semua perjanjian yang dilakukan delegasi Indonesia di Turki. Merealisasikan kerja sama antara kedua negara perlu dilakukan, tidak hanya kerja sama di bidang industri militer, melainkan dalam kerja sama dalam bidang pendidikan, ekonomi, dan juga budaya.







Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden Persatuan Emirat Arab (PEA), Mohamed bin Zayed Al Nahyan (MBZ), dalam sebuah pertemuan yang berlangsung hangat di Istana Qasr Al Shatie, Abu Dhabi, pada Rabu, 9 April 2025. (Foto: BPMI Setpres)

Di Mesir dan Qatar, Presiden Prabowo mendorong penguatan hubungan perdagangan dan diplomasi, serta membahas upaya kemanusiaan untuk Palestina. Di kedua negara ini, ia menegaskan komitmen Indonesia terhadap solusi dua negara dan pentingnya segera diwujudkannya gencatan senjata di Gaza.

Puncak lawatan ditutup di Yordania, di mana Presiden Prabowo bertemu dengan Raja Abdullah II. Diskusi berfokus pada peran Indonesia dalam inisiatif kemanusiaan untuk Gaza, termasuk kemungkinan pengiriman bantuan kemanusiaan dan kerja sama diplomatik untuk mendukung perdamaian di kawasan.

Isu Palestina menjadi salah satu pembahasan penting dalam diskusi. Peran Prabowo Subianto untuk menengahi panasnya konflik di Gaza dan Palestina secara keseluruhan dianggap penting. Komitmen yang diberikan oleh Presiden Prabowo untuk terus memberi bantuan kemanusiaan ke Palestina di dalam lawatannya tersebut patut diberi apresiasi, mengingat ini sudah menjadi amanat konstitusi untuk terus mengawal kemerdekaan Palestina.

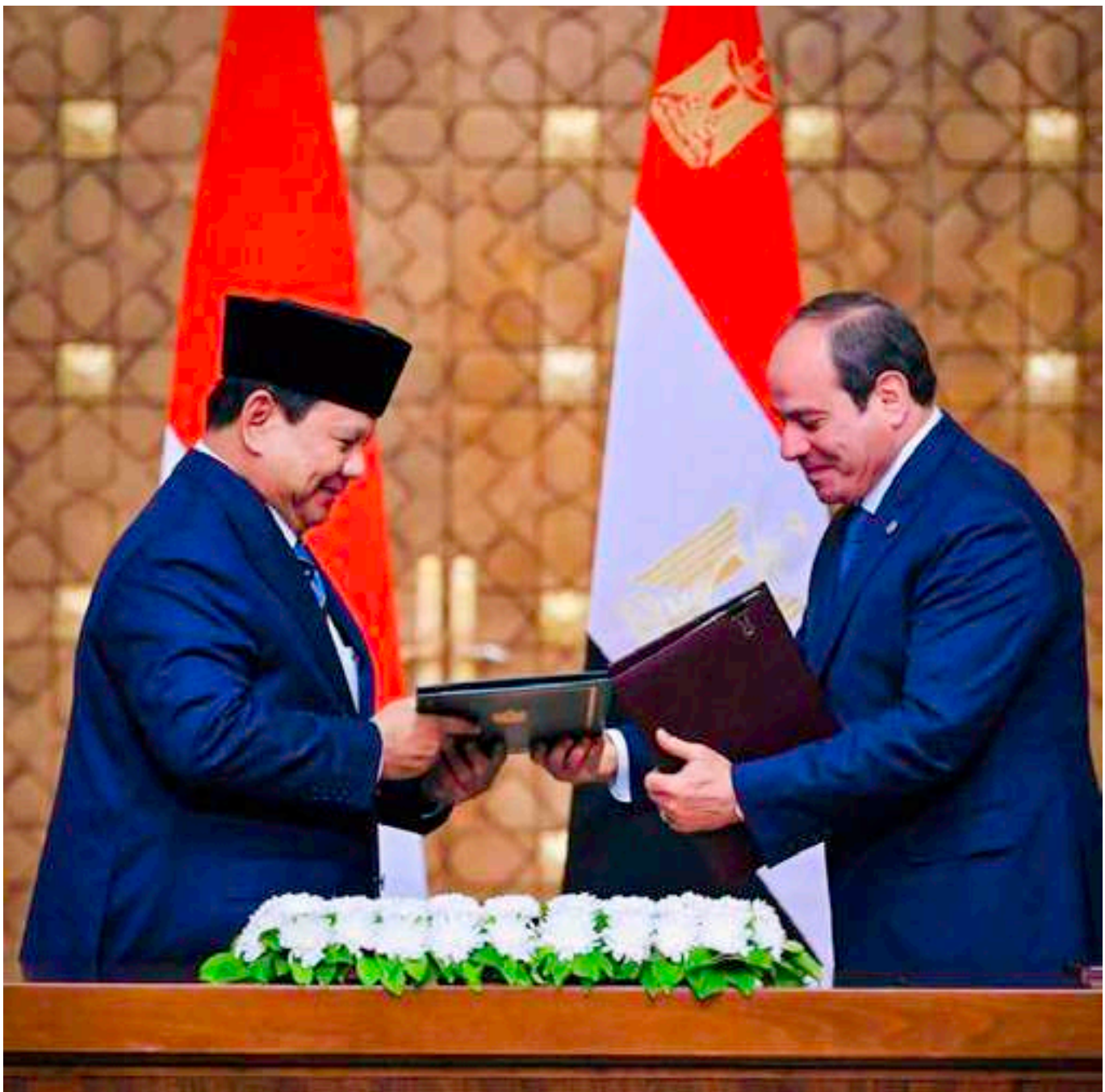
Kunjungan ini secara keseluruhan mencerminkan upaya aktif Indonesia, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, untuk menempatkan diri sebagai aktor penting dalam diplomasi regional dan global, sambil memperluas kerjasama strategis yang mendukung pembangunan nasional serta perdamaian internasional.

Perjalanan Prabowo juga tepat pada panasnya hubungan geopolitik antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Perang dagang antara kedua negara tersebut telah menimbulkan bukan hanya kepanikan pasar dunia tapi juga ketidakpastian pertumbuhan ekonomi yang dirasakan di seluruh dunia. Peran Prabowo dan Indonesia untuk menguatkan kembali poros kekuatan ekonomi menengah diluar Blok China dan Eropa juga diperkuat melalui *tour de Middle East* dengan pertemuan negara-negara D8 seperti Turki dan Mesir.

Lawatan penting Presiden Prabowo Subianto dalam presidensi D8 Summit (Pertemuan Negara-Negara Ekonomi Menengah yaitu Bangladesh, Mesir, Indo-

nesia, Iran, Malaysia, Nigeria, Pakistan, dan Turki) dinilai bisa membangun dan meningkatkan kerjasama yang kuat sebelum ajang *D8 Summit* nanti yang akan diselenggarakan di Indonesia tahun 2026. Perjalanan ini dinilai sebagai bentuk kekuatan independen Indo-

nesia di bawah pimpinan Prabowo Subianto untuk bisa secara langsung bernegosiasi dengan para penting dan pemimpin negara-negara Timur Tengah dan Turki. @



Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Presiden Republik Arab Mesir Abdel Fattah El-Sisi melakukan penandatanganan Pernyataan Bersama tentang Kemitraan Strategis antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Arab Mesir, usai pertemuan di Istana Al Ittihadiya, Kairo, pada Sabtu, 12 April 2025. (Foto: BPMI Setpres)

GREAT LECTURE Jumat, 18 April 2025

GREAT LECTURE BERSAMA UTKARSH SAXENA CO-FOUNDER DAN CEO ADALAT AI

Pada hari Jumat 18 April 2025, GREAT Institute menerima tamu Utkarsh Saxena, kandidat PhD dari Oxford University UK yang juga Co-Founder dan CEO Adalat-AI yang datang bersama Direktur Senior Bandung Trust Advisory Group (B-Trust) yang dipimpin Dr. Ir. Siswanda Harso Sumarto. Acara ini dirangkum menjadi GREAT Lecture pertama GREAT Institute.

Acara ini dihadiri oleh jajaran GREAT Institute yaitu Ketua Dewan Direktur Dr. Syahganda Nainggolan, Wakil Ketua Dewan Penasihat Wahyono Suparno, Direktur Eksekutif Dr. Sudarto, Direktur Komunikasi Khalid Zabidi, serta pengacara Firman Mulyadi. Acara dipandu oleh peneliti Desk Politik Omar Thalib.

Utkarsh memaparkan produk buaatannya bernama Adalat AI. Adalat AI dibuat beliau bersama dengan koleganya yang ditawarkan mereka untuk membantu proses peradilan Mahkamah Agung dalam menghadapi persoalan dan tantangan yang dihadapi oleh lembaga peradilan ter-

tinggi di Indonesia tersebut.

Adalat-AI adalah sistem AI yang dikhususkan untuk bekerja di dalam pengadilan. Tujuan Adalat-AI untuk mengurangi beban sumber daya manusia di dalam lembaga pengadilan di Indonesia. Adalat-AI sudah dipakai di beberapa pengadilan di India dan terbukti membantu dan mengurangi masalah yang disebabkan dari human error di pengadilan di India.

GREAT Institute bersyukur bisa mendapatkan pelajaran penting tentang kemampuan AI dalam sistem peradilan. @



PRABOWONOMICS DI ERA TARIFF WAR: STRATEGI KEMANDIRIAN DALAM DUNIA YANG SEDANG BERPERANG



Ketika dunia makin terjerat dalam perang tarif yang dipicu proteksionisme ekonomi global, Indonesia dihadapkan pada dilema historis: tunduk pada pusaran kekuatan besar atau membangun jalannya sendiri.

Dalam Focus Group Discussion bertema “Prabowonomics di Era Tariff War” yang digelar GREAT Institute, Kamis (24/04), para ekonom, pengambil kebijakan, dan pelaku industri menyatukan suara: Indonesia membutuhkan pendekatan ekonomi yang tidak sekadar reaktif, melainkan ideologis dan membumi.

Dipandu Ketua Dewan Direktur GREAT Institute, Dr. Syahganda Nainggolan, diskusi dibuka dengan satu kesimpulan keras: perang dagang hari ini bukan lagi sekadar kompetisi dagang, tetapi babak baru dari ekonomi sebagai instrumen dominasi global. Dunia telah berpindah dari era free trade menuju economic warfare, dan Indonesia tak bisa lagi bermain dengan logika dagang konvensional.

Prabowonomics, dalam tafsir forum ini, tampil bukan

Wakil Menteri Koperasi, Dr. Ferry Joko Juliantono, menyebut kebijakan ekonomi Presiden Prabowo sebagai penyimpangan sadar dari neoliberalisme yang dua dekade terakhir mencengkeram Indonesia. “Prabowo tidak hanya menawarkan program, tetapi juga membangun ulang arah. Ini bukan kosmetik, ini reformasi struktural,” kata Ferry. Ia menegaskan bahwa akar Prabowonomics tumbuh dari keresahan rakyat desa yang selama ini ditinggalkan negara dan hanya berurusan dengan tengkulak serta rente. “Program seperti Koperasi Merah Putih, Klinik Desa, hingga Gudang dan Toko Sembako di desa adalah jawaban konkret atas kerinduan rakyat akan negara yang hadir,” kata dia.

Dr. Tito Sulistio dari OJK menilai keberanian pemerintah mengalokasikan Rp1.000 triliun APBN sebagai bentuk investasi langsung kepada rakyat. Ia mencon-



sebagai program jangka pendek, melainkan sebagai paradigma kebangsaan. Ia menegaskan kembali kedaulatan, keberpihakan kepada rakyat, serta ke-

beranian menempuh jalur sendiri—meski tak selalu populer di meja ekonomi global.



Poppy Dharsono



Prof. Dian Masyita, PhD



Dr. Poempida Hidayatullah



Dharma Setiawan, MBA



Dr. Perdana Wahyu Santosa

tohkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai investasi jangka panjang pada kualitas manusia Indonesia. “Itu bukan sekadar biaya, itu investasi pada otak rakyat,” ujar Tito. Namun ia juga menyayangkan lemahnya narasi yang membungkus kebijakan tersebut. “Sayangnya, kebijakan visioner ini tidak disampaikan dengan bahasa yang menyentuh akar,” kata dia.

Mantan eksekutif industri otomotif Jepang, I Made Dana Tangkas, menekankan pentingnya industrialisasi berbasis desa dan UMKM. “Toyota itu dulu UMKM. Kalau desa hanya jadi pasar, kita tidak akan pernah maju,” ujar Made. “Desa harus jadi produsen.”

Dalam nada yang sama, Dr. Anthony Budiawan mendorong kembali strategi import substitution industrialization (ISI) yang pernah diperjuangkan Bung Karno. “Meski dianggap usang, ISI tetap relevan. Terutama di tengah rantai pasok global yang timpang dan berisiko tinggi,” kata Anthony.

Prof. Perdana Wahyu Santosa dari Universitas Yarsi menyebut perang tarif global sebagai blessing in disguise yang justru membuka peluang ekspor ke Afrika, Timur Tengah, dan Asia Selatan. Namun ia mengkritik posisi tawar Indonesia yang kerap pasif. “Jangan sampai kita jadi negara yang diketok-ketok kepalanya oleh kekuatan asing,” kata dia. “Keberanian harus dimulai dari dalam negeri.”

Prof. Dian Masyita, PhD, menautkan Prabowonomics dengan nilai-nilai Islam dan UUD 1945. Ia mengutip Surat Al-Hasyr ayat 7: “Supaya harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja dari kalangan kamu.” “Pasal 33 UUD 1945 adalah fondasi moral sekaligus konstitusional dari sistem ekonomi yang berkeadilan,” ujar Dian.

Nada paling tajam muncul dari Dr. Poempida Hidayatulloh. Ia menyebut Prabowonomics sebagai “ekonomi Robin Hood”—bukan dalam arti mengambil dari yang kaya, melainkan membangun keadilan



Dr. Ferry Joko Juliantono, Wakil Menteri Koperasi.

dari bawah. “Ini ekonomi yang tidak menunggu pertumbuhan menetes ke bawah, tetapi mendorong dari akar,” kata dia.

Di tengah perang dagang dan tekanan global yang makin kompleks, forum ini menyimpulkan bahwa Prabowonomics bukan sekadar strategi teknis, tetapi juga strategi ideologis. Ia tidak hanya menjadi reaksi atas perubahan dunia, tetapi pernyataan posisi: bahwa Indonesia tak sedang menunggu nasib, tetapi hendak menuliskannya sendiri.

Menjelang penutupan diskusi, Dr. Ferry menyerukan agar mimpi besar ini dihidupkan bersama. “Dari koperasi desa hingga swasembada energi, ini bukan mimpi elite. Ini mimpi rakyat,” kata dia.

Dr. Syahganda menambahkan bahwa kesadaran akan economic war adalah syarat pertama menuju kemandirian. “Kalau kita tidak siap secara mental dan strategi, maka bangsa ini hanya akan jadi pas-

ar dari narasi orang lain,” ujar Syahganda. “Padahal semua potensi sudah ada. Yang dibutuhkan tinggal keberanian untuk memilih berdiri tegak.”

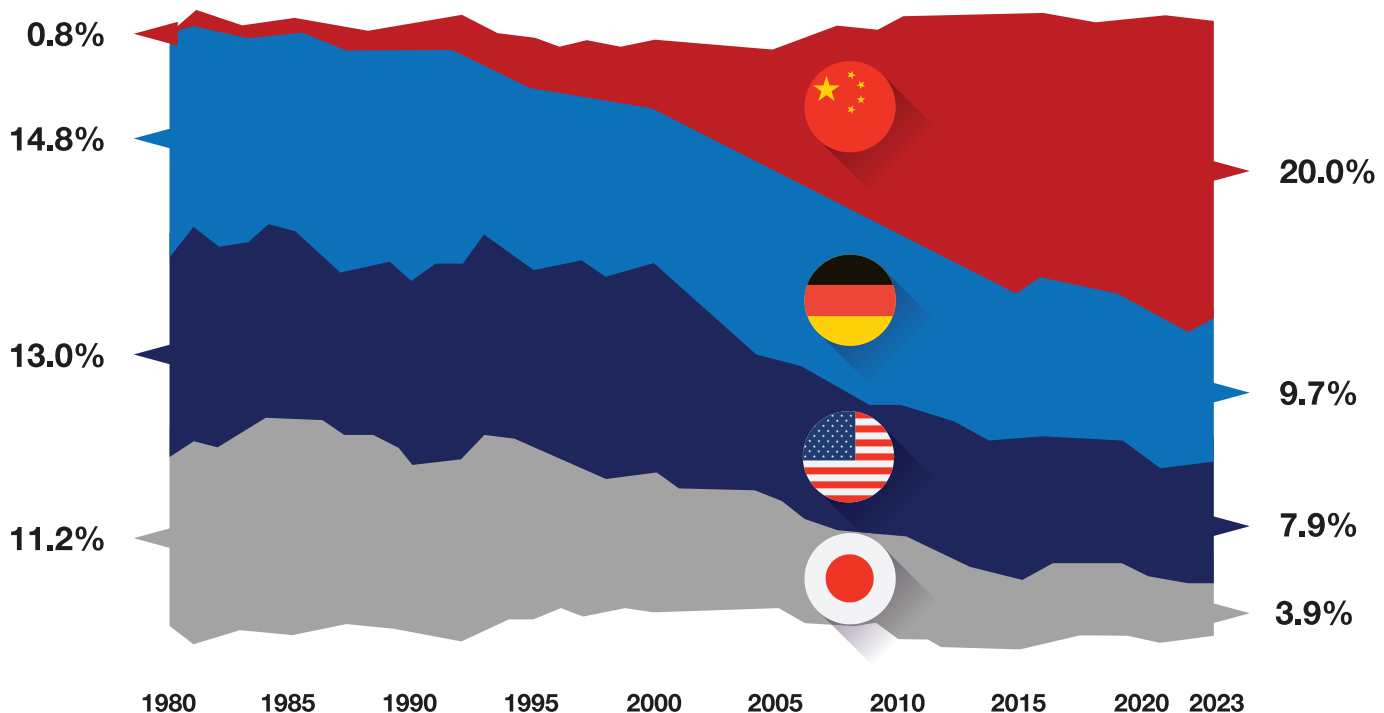
Prabowonomics, seperti dicatat forum ini, bukan sekadar janji politik. Ia adalah pertarungan etis. Di tengah dunia yang liberal dan oportunistik, Indonesia—jika cukup berani—masih bisa memilih jalan yang adil, mandiri, dan manusiawi. Mungkin itu satu-satunya jalan yang tersisa, dan masih menyisakan harga diri.

FGD ini dihadiri puluhan peserta. Di antaranya: Dr. Ferry Joko Juliantono, Dr. Tito Sulistio, Prof. Dr. Perdana Wahyu Santosa, Prof. Dian Masyita, PhD, Dr. Poempida Hidayatullah, Dr. Edie Rizliyanto, Dr. Walneg Jas, Dr. Siswanda Sumarto, Dr. Anto Sudarto, Ahmad Noer Hidayat, M.P.P., Anthony Budiawan, Poppy Dharsono, I Made Dana Tangkas, dan Dharma Setiawan, MBA.@

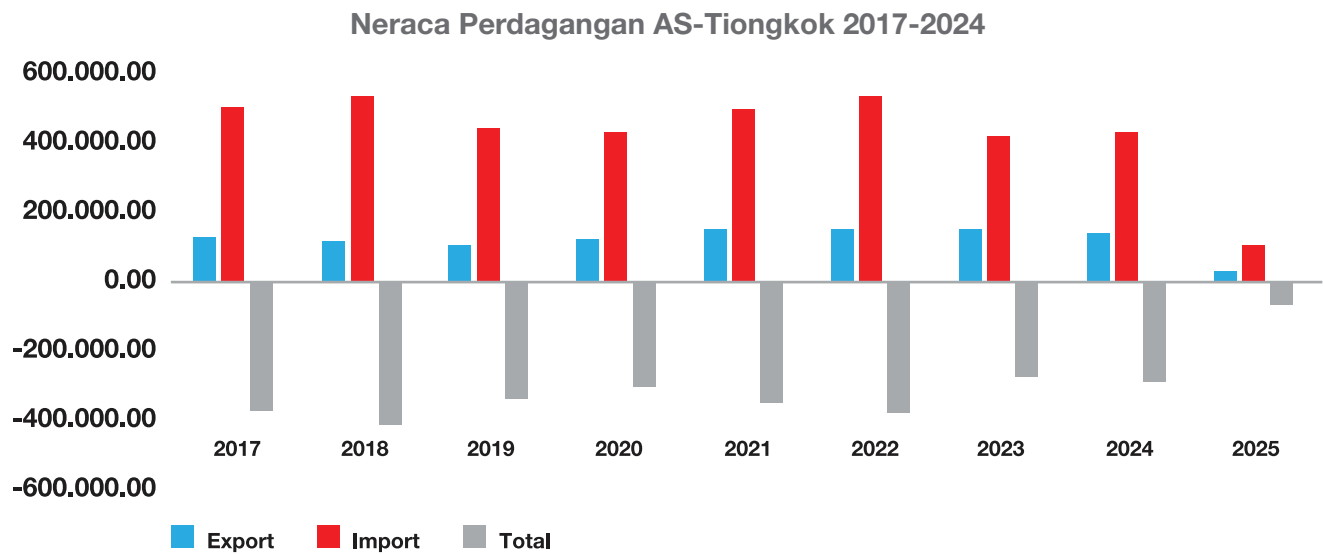
Prabowonomics di Era TARIFF WAR

Pada 02 April 2025, Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, secara resmi menerapkan tarif resiprokal dengan nilai dasar 10% pada seluruh negara. Penerapan tarif biaya impor ini didasarkan pada pandangan Donald Trump yang melihat defisit impor dagang AS dengan negara-negara lain yang dinilai tidak adil dan keinginan untuk mewujudkan kemandirian ekonomi serta mengurangi ketergantungan impor.

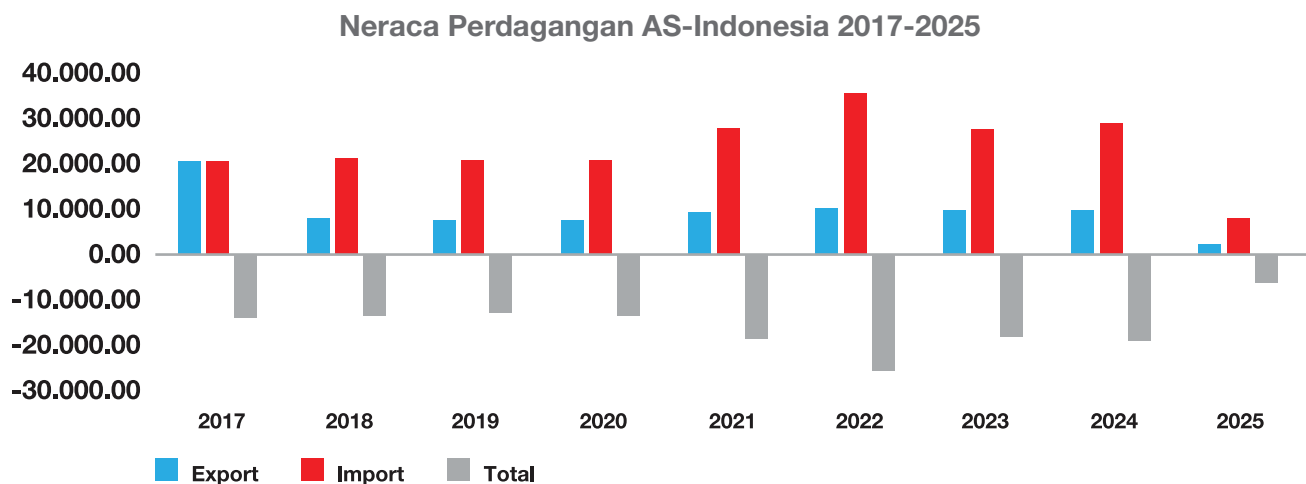
The Shift in Manufacturing Exports:
U.S., Germany, and Japan Decline as China Rises



Sumber: WTO 2025



Sumber: Diolah dari data perdagangan Amerika Serikat.



Sumber: Diolah dari data perdagangan Amerika Serikat.

Di luar alasan tersebut, salah satunya adalah persaingan dagang dengan Republik Rakyat Tiongkok (Tiongkok) yang semakin memanas akibat defisit impor yang terus-menerus terjadi.

Neraca perdagangan AS dengan Indonesia selalu mengalami defisit impor dari 2017 sampai triwulan I 2025. Defisit impor tersebut menjadi faktor utama yang menyebabkan Indonesia mendapatkan nilai tarif impor sebesar 32%. Besarnya nilai tarif yang diber-

ikan kepada Indonesia menjadi tantangan tersendiri, karena dapat menimbulkan gangguan terhadap perekonomian Indonesia seperti penurunan investasi asing, ketidakstabilan ekonomi akibat fluktuasi pasar ekspor, hingga ancaman PHK.

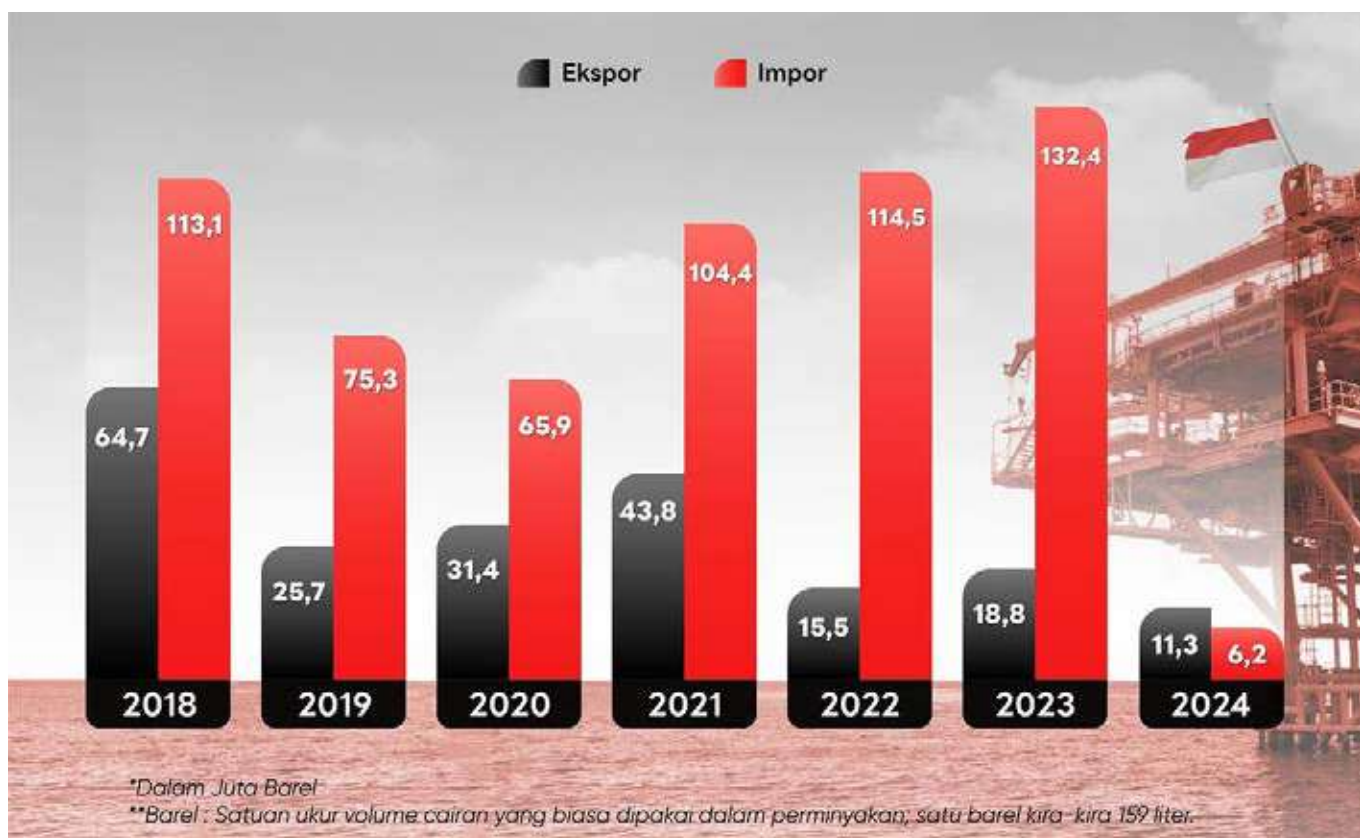
Menanggapi nilai tarif tersebut, Indonesia telah mengirimkan delegasi khusus untuk bernegosiasi. Di lain sisi, Presiden Prabowo memiliki strategi untuk menghadapi nilai tarif yang tinggi, yaitu memperluas mi-

tra dagang Indonesia, mempercepat hilirisasi sumber daya alam, dan memperkuat daya beli dalam negeri. Strategi-strategi tersebut sebenarnya telah tertuang dalam Asta Cita atau bisa dikenal sebagai Prabowoonomics. Prabowoonomics, secara sederhana, mengedepankan kemandirian ekonomi. Namun, apakah Prabowoonomics mampu menghadapi tarif Trump? Lebih dari 50% ekspor Indonesia untuk barang elektronik, sepatu, pakaian, dan produk laut ditujukan ke AS. Dengan nilai tarif yang besar, nilai dari barang ekspor tersebut akan semakin mahal dan dapat menurunkan permintaan ekspor. Hal ini memberi dampak buruk terhadap industri dalam negeri, karena akan memaksa pelaku industri untuk melakukan efisiensi, bahkan melakukan PHK, jika permintaan ekspor menurun.

Indonesia juga masih membutuhkan impor energi (terutama minyak dan gas) dan impor kebutuhan industri pertanian (seperti kedelai dan mesin). Kebijakan tersebut dapat menurunkan angka produksi pangan yang bergantung pada impor dari AS (seperti tempe, tahu, roti) dan mengakibatkan kelangkaan energi sehingga harga energi akan meningkat.

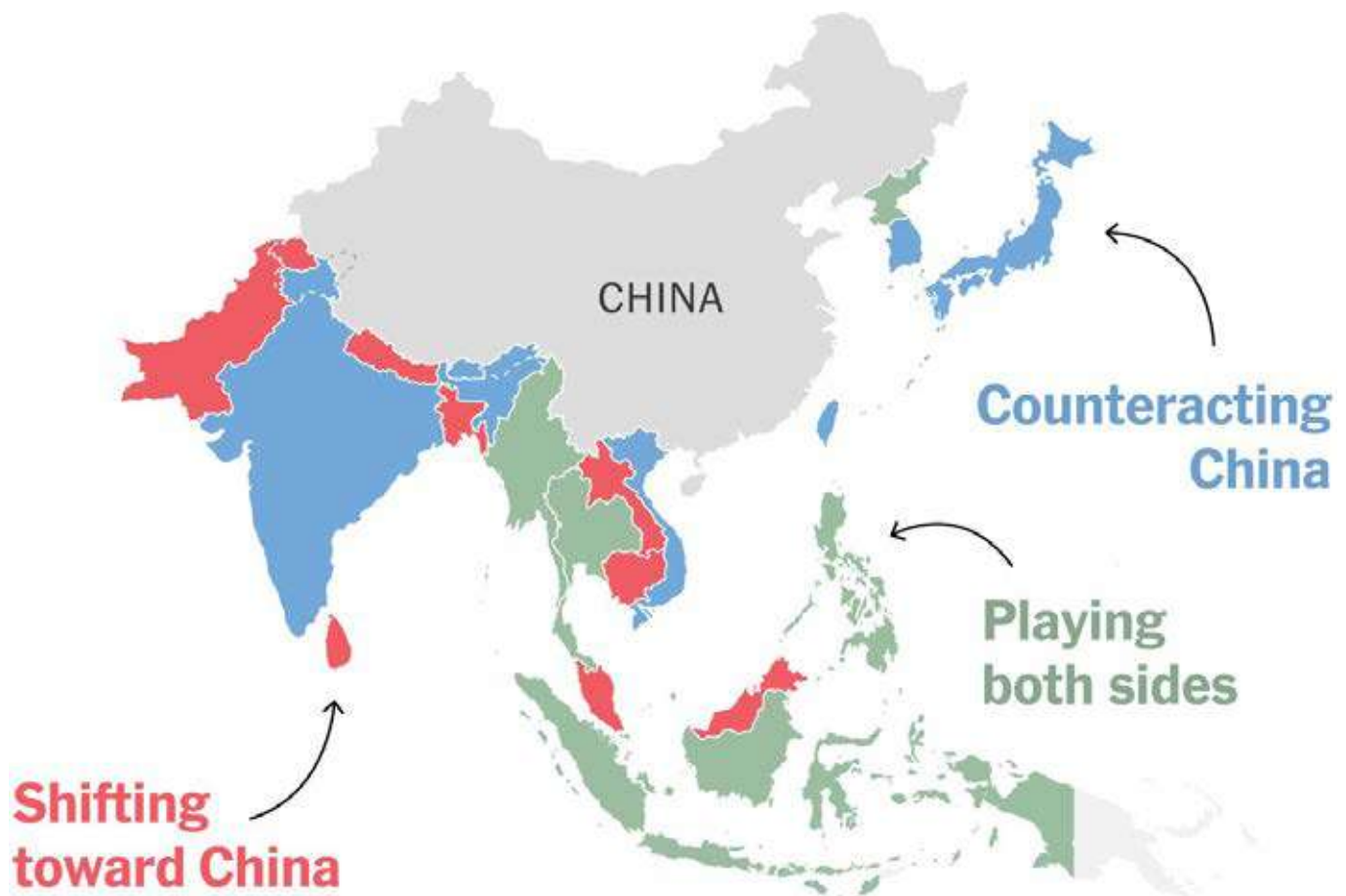
Presiden Prabowo dengan Prabowoonomicsnya yang mengedepankan kemandirian ekonomi dengan swasembada pangan, energi, dan air serta strategi-strateginya untuk menghadapi tarif impor AS dengan memperluas mitra dagang, mempercepat hilirisasi, dan memperkuat daya beli dalam negeri, merupakan langkah yang tepat untuk menghadapi perang dagang. Kemandirian ekonomi akan membuat Indo-

Jumlah Ekspor Minyak Mentah Indonesia



Sumber: ESDM

Dinamika geopolitik Cina dalam menghadapi dominasi Amerika di Asia Pasifik



Sumber: New York Times (2018)

nesia mengurangi ketergantungannya terhadap impor, sehingga kebijakan tarif dari AS tidak memberi pengaruh yang besar.

Pemerintah perlu memaksimalkan kemampuan ekonomi dalam negeri melalui program-program strategisnya, seperti Kopdes Merah Putih dan Makan Bergizi Gratis. Program-program tersebut perlu memastikan dapat menyerap tenaga kerja dalam negeri dan memperkuat industri nasional.

Dalam konteks perang dagang yang dapat berkembang menjadi perang ekonomi, Prabowo sedang menjalankan sistem ekonomi komando, dilatarbelakangi oleh kemampuannya sebagai jenderal tem-

pur. Tetapi tentu saja ekonomi komando ini perlu memiliki jangka waktu agar tidak terlalu lama menggunakan pendekatan top-down.

Kebijakan ekonomi Prabowo pada dasarnya adalah membangun dari desa, sedikit banyak terinspirasi dari strategi desa mengepung kota. Maka, ekonomi komando dijalankan dalam rangka memperkuat perekonomian rakyat di desa, agar memiliki kapasitas dan mampu menjadi kantong-kantong ketahanan ekonomi menuju kedaulatan ekonomi Indonesia di tengah perang dagang yang sedang melanda dunia. @

POLITIK ENERGI: MENUJU SWASEMBADA ENERGI MELALUI TEKNOLOGI NUKLIR



Di tengah meningkatnya urgensi kedaulatan energi nasional, Focus Group Discussion bertajuk “Politik Energi: Menuju Swasembada Energi Melalui Teknologi Nuklir” yang digelar Kamis, 30 April 2025, mencatat satu konsensus penting:

Dari aspek teknis dan waktu, Dr. Ing Kusnanto dari Universitas Gadjah Mada memperingatkan: “Tinggal tujuh tahun menuju 2032. Negara lain seperti Jepang membangun PLTN dalam 4,5 tahun dengan kesia-





Dwi Sawung



Ir. Rijalul Fikri



Deva Rachman, S.Sos, MSi.



Dr. Ir. Arnold Soetrisnanto



Irwanuddin H.I. Kulla

isu nuklir. “Kita ini bukan pendatang baru, tapi late comer yang tertinggal karena terlalu lama gamang. Padahal, dari sisi keamanan, probabilitas kegagalan PLTN modern adalah satu dalam sepuluh ribu tahun.”

Salah satu bagian forum yang paling reflektif datang dari Prof. Sulfikar Amir, pengajar di Nanyang Technological University, Singapura. Ia membedah tragedi Fukushima dan menyimpulkan bahwa akar kegagalan bukan pada teknologi, tetapi pada kelembagaan dan komunikasi krisis. Ia mengusulkan agar Indonesia belajar dari Jepang dalam membangun kepercayaan publik, termasuk melalui model redistribusi hasil—seperti 2 persen pendapatan PLTN yang masuk ke kas desa-desa sekitar PLTN.

Poin geopolitik dan keamanan disampaikan oleh Mayjen Purn. Dr. Ir. Pujo Widodo, yang mengingatkan potensi risiko tinggi dalam pengoperasian PLTN. “Sistem kendali PLTN harus diamankan oleh aparat yang paham teknologi nuklir. Serangan siber bisa

menjadi senjata destruktif. Maka dari itu, komponen pertahanan dan bela negara harus jadi bagian dari desain sistem nuklir nasional,” katanya.

Sementara itu, kritik datang dari WALHI melalui Dwi Sawung. Ia menyatakan bahwa keraguan publik terhadap nuklir tidak bisa disalahkan begitu saja. “Kami masih menanti jaminan keselamatan, jaminan tidak adanya kebocoran, dan—yang tak kalah penting—jaminan bahwa proyek sebesar ini tak akan dikorupsi. Tanpa itu, sulit untuk percaya,” ujarnya.

Nada tegas juga disampaikan Deva Rachman, praktisi komunikasi korporasi yang menggarisbawahi bahwa persoalan energi nuklir lebih terletak pada kepemimpinan dan integritas birokrasi. “Kita bukan kekurangan modal, kita kekurangan niat baik. Regulasi lambat, koordinasi buruk. Ini soal governance,” katanya.

Forum juga kian dinamis ketika Darmawan Sepri-



yossa, seorang wartawan yang menjadi peserta, menyampaikan kritik keras terhadap cara negara ini membungkus isu energi nuklir selama puluhan tahun. Ia menyebut bahwa penolakan publik bukanlah karena kebodohan atau ketakutan yang irasional, melainkan karena selama ini mereka ‘ditinggalkan dalam kekosongan narasi.’ Narasi soal PLTN tak pernah datang sebagai upaya pemerintah menjernihkan situasi dan mendatangkan optimisme kepada publik. Sementara, narasi PLTN diisi berbagai kelompok kepentingan, yang seringkali berlawanan dengan kepentingan umum untuk segera mendapatkan energi yang murah dan stabil.

“Yang kita hadapi bukan kebodohan, melainkan tuna-literasi energi. Kita kalah dalam hal komunikasi, bukan kalah teknologi. PLTN hari ini adalah kebutuhan. Keharusan bahkan, jika kita ingin bicara soal kedaulatan energi, mencegah memburuknya krisis iklim, dan menjamin masa depan bangsa,” ujar Darmawan.

Ia menyerukan revolusi komunikasi energi di Indonesia, menyebut bahwa narasi lama yang hanya berkutat pada risiko dan bahaya tidak lagi relevan. “Kita perlu ubah fokus. Dari risiko ke clean energy, dari trauma ke kedaulatan nasional. Cerita energi harus disampaikan dengan cara yang bisa dimengerti rakyat, bukan dengan istilah teknis yang dingin dan elitis.”

Diskusi ditutup dengan paparan dari Ir. Rijalul Fikri yang merinci tujuh dokumen strategis pengembangan PLTN Indonesia, termasuk yang menyentuh aspek kelembagaan, kerja sama internasional, dan sistem pendanaan. Ia menegaskan bahwa PLTN harus dijadikan objek vital nasional dan dikawal oleh institusi yang tidak bisa diintervensi secara politis.

Secara keseluruhan, FGD ini memperlihatkan bahwa tantangan pembangunan PLTN bukan lagi pada teknologi atau pendanaan, melainkan pada keberanian mengambil keputusan, ketegasan dalam regulasi, dan



kecerdasan dalam membangun narasi. Sebagaimana dikatakan dalam forum itu: “Kalau kita terus takut pada masa lalu, kita akan kehilangan masa depan.” Kini, yang diperlukan adalah negara yang tahu apa yang ingin diperjuangkan, dan masyarakat yang tahu mengapa mereka perlu ikut berjuang.

FGD ini dihadiri puluhan peserta dan hadirin, termasuk sekelompok mahasiswa ITB dan Universitas Pancasila, Jakarta. Peserta FGD antara lain: Dr. Syahganda Nainggolan (ketua Dewan Direktur

GREAT Institute); Dr. H. Mulyanto, M.Eng (anggota DPR RI); Irwanuddin H.I. Kulla (Tenaga Ahli Menteri ESDM Bidang Pengembangan Potensi Pemanfaatan Tenaga Nuklir); Associate Prof. Sulfikar Amir, PhD. (Dosen Nanyang Technological University, Singapore); Dr. Ing. Ir. Kusnanto (Dosen Prodi Teknik Nuklir Fakultas Teknik UGM); Mayjen TNI (purn) Dr. Dr. Ir. Pujo Widodo, S.E., S.H., S.T., M.A., M.D.S., M.Si., M.Si.Han. (Dosen Universitas Pertahanan); Dr. Ir. Arnold Soetrisnanto (Ketua Umum Masyarakat Energi Baru Nuklir Indonesia/MEBNI); Prof. Dr. Irwan Meila-



Mayjen TNI (purn) Dr. Dr. Ir. Pujo Widodo, S.E., S.H., S.T., M.A., M.D.S., M.Si., M.Si.Han.

no, S.T., M.Sc (Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan ITB); Prof. Dr. Eng. Sidik Permana, S.Si., M.Eng. (Guru Besar FMIPA ITB); Supriyadi Sadi, Ph.D. M.ChE., MenvEng. (Database Manager & Federal Research Scientist for Nuclear Emergency Response at US CDC Atlanta Georgia, USA); Dharma Setiawan, MBA (Ketua Dewan Pengurus Prakarsa Lingkar Delapan); Dr. Sudarto (Ahli Komunikasi Krisis); Dwi Sawung (Manager Kampanye Infrastruktur & Tata Ruang WALHI Eknas); Deva Rachman, S.Sos, MSi. (Public Communication Specialist); H.

Darmawan Sepriyossa, SE. (Jurnalis); Ir. Rijalul Fikri (Sekretaris Eksekutif 7 Dokumen Kebijakan Pembangunan PLTN Indonesia); Ir. Turino Yulianto, MSi (Ketua Desk Energi, GREAT Institute); Bernadus Sudarman-ta (Direktur Pengembangan Bisnis dan Niaga Indonesia Power); Tetuko Wirjoatmodjo (Peneliti Energi Baru dan Terbarukan); Muhammad Subhan (Community Development Specialist), serta Dr Zarman Syah.@

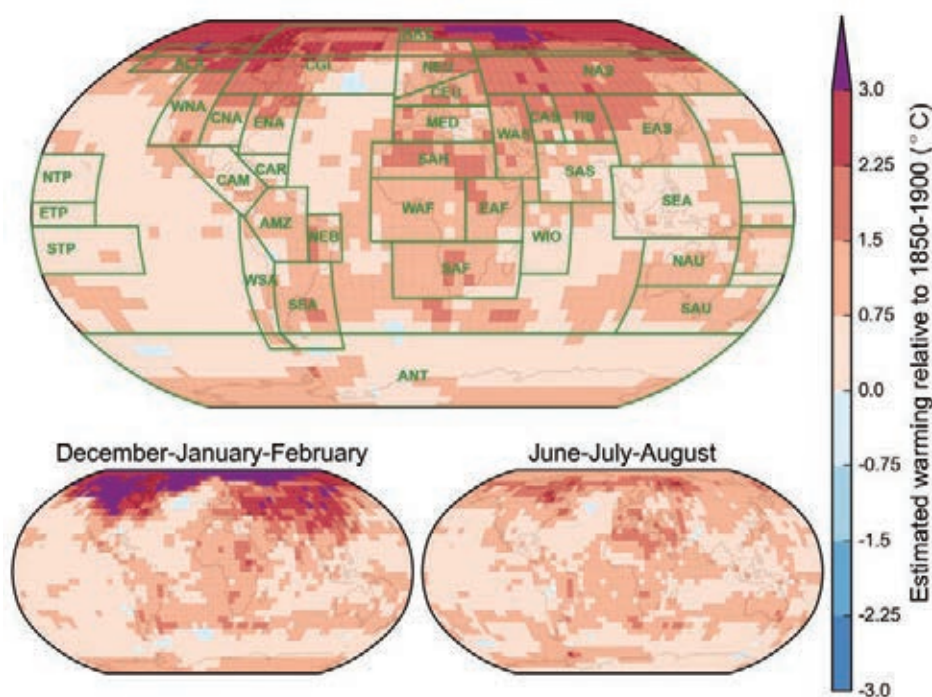
MENUJU SWASEMBADA ENERGI DENGAN ENERGI NUKLIR

Pertumbuhan kebutuhan energi di dunia terus berkembang seiring waktu. Pertumbuhan penduduk dan industri yang terus berkembang meningkatkan kebutuhan akan energi, terutama ketenagalistrikan.

Ketergantungan terhadap energi fosil menjadikan sektor energi penyumbang gas emisi rumah kaca terbesar. Konsentrasi gas rumah kaca, baik dari CO₂

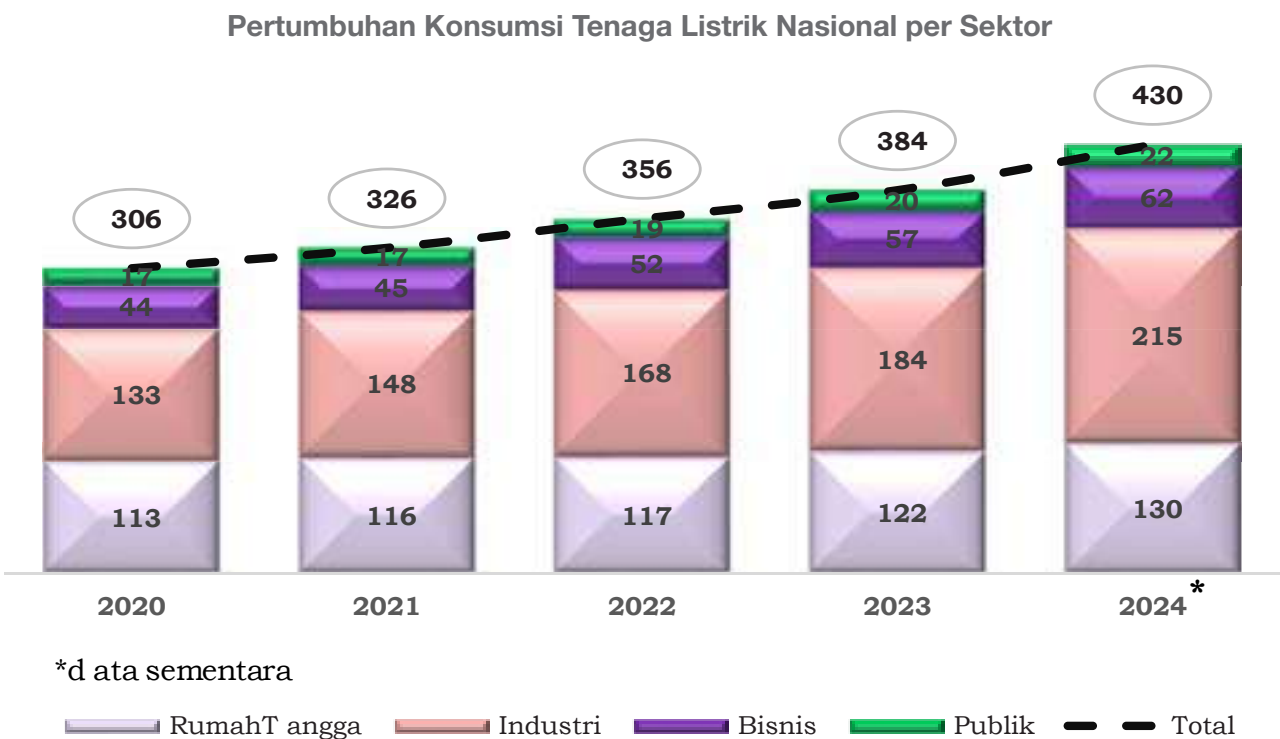
(Karbondioksida), CH₄ (Metana), ataupun N₂O (Nitrit oksida), meningkatkan suhu dunia yang mengakibatkan terjadinya pemanasan global.

Pemanasan Global 2006-2015 dibandingkan dengan 1850-1900

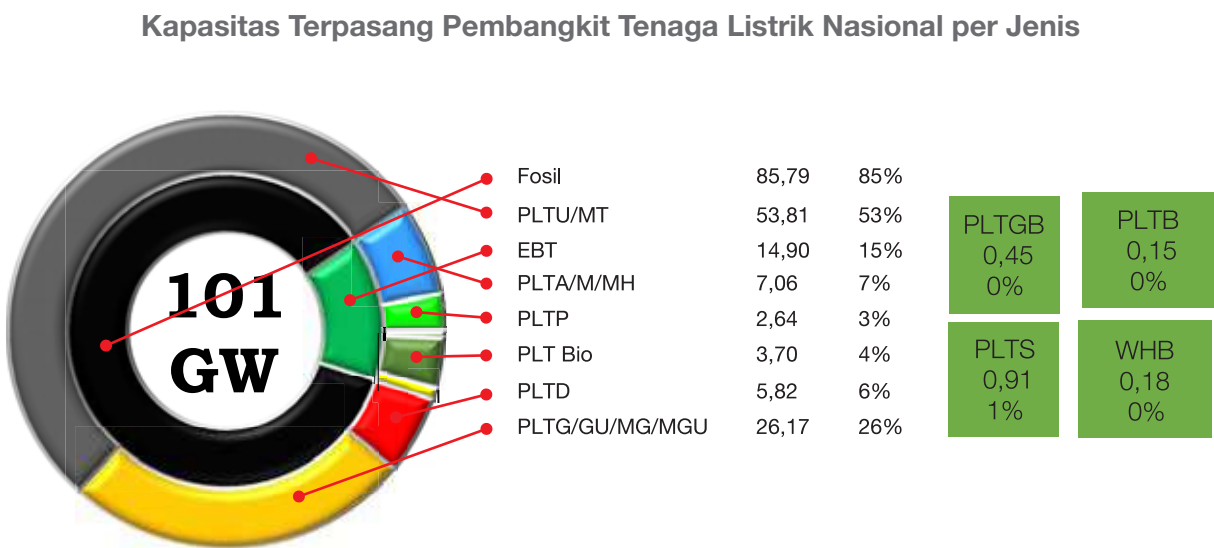


Sumber: IPCC, 2020, www.ipcc.ch/sr15/graphics/#cid_541

Saat ini, industri di dunia maupun di Indonesia, masih bergantung pada energi fosil. Di Indonesia sendiri, kebutuhan akan tenaga listrik terus meningkat. Tenaga listrik di Indonesia masih bertumpu pada energi fosil. Seperti tampak dalam grafik dibawah ini.



Sumber: RUKN, 2025



Sumber: RUKN, 2025

Bertumpunya pembangkit tenaga listrik di Indonesia dengan energi fosil mengakibatkan Indonesia menjadi penyumbang emisi gas rumah kaca terbesar di Asia Tenggara. Lihat Gambar dibawah ini.

Untuk mencapai target *Net Zero Emission* (NZE) pada tahun 2060 dan mencapai kemandirian energi nasional, agenda transisi energi sudah seharusnya menjadi agenda utama yang harus dijalankan. Tercapainya kemandirian energi nasional menjadi salah satu program utama pemerintahan Presiden Prabowo di samping kemandirian pangan dan air. Untuk memenuhi kebutuhan energi dalam negeri diperlukan pasokan energi dari berbagai sumber. Salah satu alternatif sumber energi yang paling efisien, rendah emisi, ramah lingkungan dan sudah berjalan baik di

beberapa negara maju adalah energi nuklir.

Nuklir merupakan suatu sumber energi hasil reaksi fisi (nuklei terbelah) atau fusi (bersatunya dua nuklei) dari nukleus (inti atom) (Krane, 1987). Hasil dari reaksi tersebut membentuk reaksi berantai yang menghasilkan energi dalam jumlah yang besar. Dari sisi efisiensi, energi yang dihasilkan dari fisi nuklir jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pembakaran bahan bakar fosil atau sumber energi terbarukan lainnya. Satu kilogram Uranium-235 dapat menghasilkan energi hampir 3 juta kali lebih besar dibandingkan dengan satu kilogram batu bara.

Indonesia saat ini memiliki problem krisis energi di mana kebutuhan konsumsi energi dalam negeri be-

Perbandingan Emisi Gas Rumah Kaca antara Negara-Negara Asia Tenggara



Sumber: Jones et al, 2024

lum bisa dipenuhi oleh sumber energi dalam negeri. Adapun teknologi nuklir secara umum masih di-bayang-bayangi ketakutan masa lalu terutama soal perang dan kecelakaan reaktor. Padahal Presiden Sukarno sejak tahun 1954, sudah mencanangkan pembangunan PLTN. Indonesia bersama India adalah dua negara yang mendapat rekomendasi dari Badan Tenaga Nuklir Internasional (IAEA) untuk membangun Reaktor Nuklir. Tetapi, India saat ini sudah memiliki 22 Reaktor Nuklir, sementara Indonesia hanya memiliki tiga Reaktor Nuklir untuk kepentingan riset semata.

Untuk itu, Pemerintah harus memahami sejauh mana tantangan dan hambatan tersebut bisa teratasi sehingga pada tahun 2032 Indonesia dapat mengoperasikan PLTN.

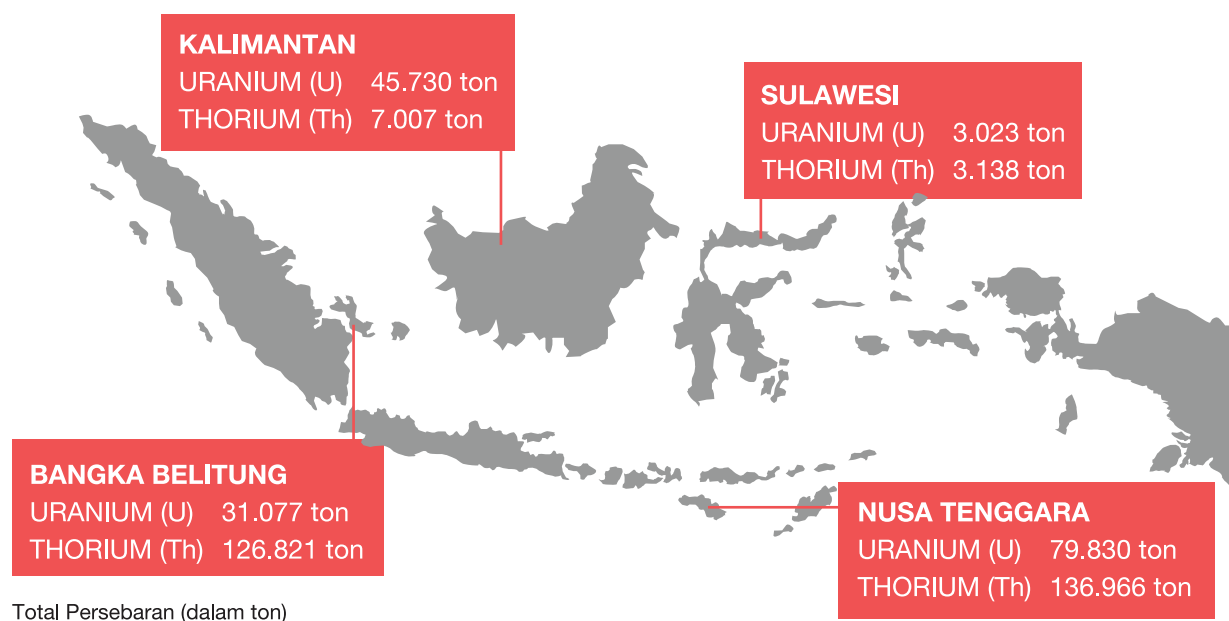
Potensi dan Rencana Implementasi Tenaga Nuklir di Indonesia

Dalam mewujudkan kedaulatan negara, Presiden Prabowo Subianto memiliki keinginan agar Indo-

nesia swasembada dalam pangan, air, dan energi. Untuk mencapai swasembada energi dan dan NZE 2060, Presiden Prabowo ingin mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil dan menambah porsi energi baru dan terbarukan dalam bauran listrik. Energi nuklir menjadi salah satu pilihan sebagai sumber energi yang akan menggantikan energi fosil (RUPTL, 2021). Pemerintah Indonesia merencanakan pembangunan PLTN sebagai bagian dari rencana transisi energi dengan target 75 GW dari energi baru dan terbarukan, Energi nuklir diharapkan dapat menyumbang 4,3 GW. Indonesia sendiri sedang dalam pembahasan kerjasama dengan Rusia untuk membangun PLTN.

Indonesia memiliki banyak sumber daya mineral yang dibutuhkan untuk PLTN, seperti di Kalimantan yang memiliki 45 ribu ton Uranium dan 7 ribu ton Thorium. Dengan cadangan sebesar itu, Indonesia bisa segera mencapai swasembada energi jika PLTN berhasil dioperasikan. Kebutuhan lahan dari PLTN 50 kali lebih rendah dari PLTU dan 18 hingga 27 kali lebih

Sumber Daya Energi Nuklir dan Potensinya di Indonesia



Sumber: Kai Putri et al., 2022

rendah dibandingkan PLTS. Satu kilogram dari uranium saja bisa menghasilkan energi selama 73 tahun (Permana, 2024).

Tantangan Dalam Implementasi Nuklir

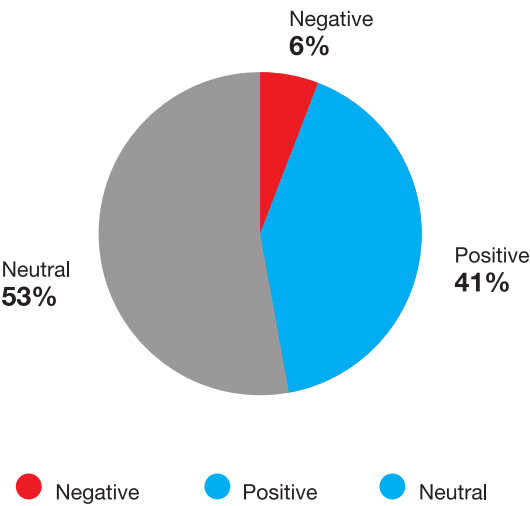
1. Aspek Komunikasi

Salah satu faktor penyebab gagalnya Pembangunan PLTN selama ini adalah lemahnya strategi komunikasi pemerintah. Masyarakat berada dalam bayang-bayang ketakutan karena ketidaktahuan mengenai energi nuklir. Misalnya kasus pencemaran di daerah Serpong beberapa tahun lalu. Sampai sekarang tidak jelas penyelesaiannya. Masyarakat masih menanti

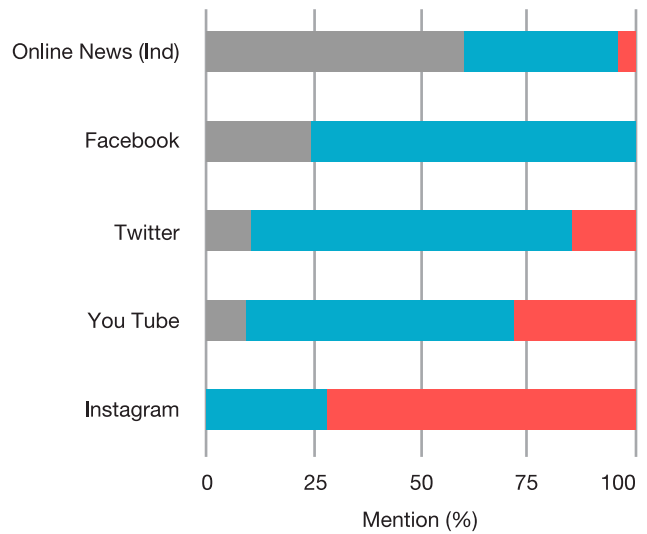
Mulai saat ini pemerintah perlu menggalang opini tentang sisi positif PLTN. Bahkan secara komunikasi, sifatnya harus lebih revolusioner mengingat kondisi Indonesia yang masuk kategori krisis energi. PLTN harus dikomunikasikan secara cerdas, seperti di Amerika Serikat, juru kampanye soal nuklir adalah mantan Miss America yang juga seorang sarjana nuklir.

Komunikasi yang dikeluarkan harus lebih fokus menarasikan potensi dari energi nuklir dan memberikan keyakinan pada masyarakat, narasi yang diangkat dapat berbentuk seperti ‘Dari risiko ke clean energy, dari trauma ke kedaulatan nasional’. Cerita energi harus disampaikan dengan cara yang bisa dimengerti rakyat, bukan dengan istilah teknis yang dingin

Sentimen Publik terhadap Pemberitaan Energi Nuklir



Sentimen Publik terhadap Pemberitaan Energi Nuklir Berdasarkan Media Sosial



jaminan keselamatan, jaminan tidak adanya kebobrokan, dan yang tak kalah penting jaminan bahwa proyek sebesar ini tak akan dikorupsi. Ketidakjelasan tersebut yang menimbulkan kelompok yang kontra dengan implementasi energi nuklir. Kegagalan dalam komunikasi publik tersebut dapat kontraproduktif terhadap rencana implementasi energi nuklir di Indonesia.

dan elitis. Indonesia bisa belajar juga dari Jepang dalam membangun kepercayaan publik, salah satunya melalui model redistribusi hasil, di mana sekitar 2% pendapatan PLTN akan masuk ke kas desa-desa di sekitar PLTN.

2. Aspek Pertahanan dan Keamanan

Dalam konteks pertahanan dan keamanan, PLTN bisa berkembang dengan fungsi sebagai senjata nuklir. Lokasi PLTN juga harus menghitung aspek geopolitik. Sistem kendali PLTN harus diamankan oleh aparat yang paham teknologi nuklir.

Serangan siber bisa menjadi senjata destruktif yang riil. Maka dari itu, komponen pertahanan dan bela negara harus jadi bagian dari desain sistem nuklir nasional. Ancaman bencana datang bukan hanya bencana alam, tetapi juga bencana buatan. Seolah-olah bencana, tapi sesungguhnya itu buatan negara lain.

Prediksi ke depan, perang semakin asimetris dan saat ini ada potensi perang dunia ketiga. Untuk menjadi negara kuat, tidak ada pilihan lain kita harus mempunyai nuklir.

3. Aspek Politik dan Tata Pemerintahan

Program PLTN selama ini mengalami kegagalan karena rendahnya konsistensi pemerintah. Setiap membahas topik PLTN selalu muncul isu lain yang menutupi sehingga program PLTN tidak berjalan lebih lanjut. Kunci dari keberhasilan implementasi PLTN adalah adanya kestabilan situasi politik dan kondisi ekonomi. Sebenarnya PLTN adalah masuk kategori Non Site Spesific yang bisa dibangun di mana saja. Dari sisi persyaratan ada yang kategori wajib dipenuhi (*mandatory*) yaitu *security, safety & safeguard*. Ada juga syarat yang tidak *mandatory* sesuai IAEA yaitu pemilihan teknologi, manajemen pengelolaan dan strategi pengembangan. Sayangnya, kita lebih sering sibuk di syarat yang tidak *mandatory*.

Untuk meyakinkan publik harus ada lembaga pengawas independen, bebas KKN dan bebas intervensi yang isinya orang-orang yang kredibel dan kompeten. Adanya lembaga ini membuat publik tenang karena operasional PLTN akan diawasi oleh lembaga yang kredibel.

Secara kelembagaan, program pengembangan PLTN ini masuk kategori strategis sehingga membutuhkan badan otonom yang diangkat langsung oleh Presiden. Seperti contoh pembentukan BRR Aceh paska terjadinya bencana tsunami. Badan ini bekerja profesional dan kinerja suksesnya bukan hanya diakui secara nasional, tetapi juga dunia.

Belajar dari kecelakaan Reaktor Nuklir di Fukushima, Jepang, banyak hal yang harus dipersiapkan oleh Indonesia, tidak sekedar uang dan teknologi. Banyak hal non-teknis juga antara lain kesiapan masyarakat, kesiapan SDM dan juga pengawasan. Secara khusus kecelakaan Fukushima terjadi karena desain sistem reaktor yang sepenuhnya didesain engineer Amerika, ternyata tidak mampu mengantisipasi adanya tsunami setinggi 15 meter yang terjadi saat itu (desain reaktor untuk tsunami 9 meter).

Kesimpulan dan Rekomendasi

Tantangan pembangunan PLTN bukan lagi hanya soal teknologi atau pendanaan, melainkan pada keberanian mengambil keputusan, ketegasan dalam regulasi, konsistensi kebijakan dan kecerdasan dalam membangun narasi. Pemerintah disini harus benar-benar dapat meyakinkan publik tentang potensi yang dimiliki oleh energi nuklir dan dampak positif yang akan didapat. Transparansi, akuntabilitas, dan konsistensi menjadi penting jika serius untuk mengimplementasikan energi nuklir.

Maka dari itu, GREAT Institute merekomendasikan pemerintah untuk membentuk badan otonom yang independen, yang secara khusus menjalankan implementasi kebijakan nuklir, termasuk PLTN. Adapun secara bisnis sebaiknya PT. Industri Nuklir Indonesia (INUKI) dibuat independen dan tidak digabung ke dalam BUMN lain sehingga bisa lebih leluasa membangun kerjasama dengan swasta lain dalam mengembangkan bisnis nuklir.

GREAT LECTURE | Senin, 05 Mei 2025

GREAT LECTURE BERSAMA DR. GREG POULGRAIN

Acara Great Lecture di Great Institute, Senin, 5 Mei 2025, tak sekadar mengulas masa lalu. Forum ini seperti membongkar luka lama yang belum sembuh: tentang Papua, tentang emas, tentang kekuasaan yang dipertukarkan dalam meja rahasia Perang Dingin.



Pembicara Acara:



Dr. Syahganda Nalngolan
Ketua Dewan Direksi GREAT Institute



GREAT Lecture

"Geopolitik dan Intervensi di Asia Tenggara: Pelajaran dari Masa Lalu Indonesia di Tengah Perang Dingin"

Pembicara
DR. GREG POULGRAIN
(Sejarahwan Terkemuka dan Penulis JFK vs Allen Dulles: Battleground Indonesia serta The Incubus of Intervention)

Pemanggap Diskusi:



Dr. Subianto Mukti **Dr. Zamron Syah**

TOPIC

- Strategi AS: JFK vs. Dulles: Pengaruh pendekatan berbeda AS terhadap politik dan kebijakan luar negeri Indonesia pada 1960-an.
- Indonesia di Perang Dingin: Peran Indonesia sebagai pion, medan konflik, atau aktor otonom dalam rivalitas global.
- Papua Barat & Freeport: Dampak kekayaan mineral Papua terhadap kepentingan asing dan varian imperialisme sumber daya.
- Konfrontasi & Kawasani: Kesalahan strategi dalam konflik Indonesia-Malaysia dan pelajaran untuk diplomasi ASEAN.
- Kepemimpinan & Geopolitik: Perbandingan idealisme non-blok Sukarno dan narasi geopolitik Prabowo saat ini.

LINK ZOOM
<https://bit.ly/GREATLecturePG-Meeting>
ID: 824 58143248 Passcode: 81509

GREAT Institute, Jalan Taman Gunawarman Timur No.15, RT.6/RW.2, Selong, Kec. Kby. Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12110

INFORMASI
Omar Thalib
GREAT Institute
Telepon: 081294407220

HARI/TANGGAL
Senin, 5 Mei 2025
Waktu: 12.30 - 14.00
(Diawali Makan Siang)

Dr. Greg Poulgrain, sejarawan asal Australia yang dikenal tajam membaca geopolitik Asia Tenggara, kembali mengingatkan bahwa Indonesia tak pernah benar-benar merdeka dari jerat intervensi asing. "In-

donesia adalah produsen emas nomor satu di dunia. Ini bukan asumsi. Ini fakta. Dan cadangan emasnya bisa ditambang selama dua abad ke depan," kata Greg, nyaris tanpa jeda.

Freeport kembali disebut. Tapi kali ini bukan hanya soal tambang, melainkan sebagai lambang dari kerakusan global yang memanfaatkan kelemahan elite nasional. “Mereka bilang hanya ada satu gram emas per ton material. Tapi saya dengar langsung dari seorang Sekjen NATO.—itu bohong besar,” ujar Poulgrain. “Saya sudah dua kali mewawancarai Jean Jacques Dozy. Versi dia sangat berbeda dari dokumen resmi Freeport. Ini bukan sekadar perbedaan teknis. Ini rekayasa.”

Tapi Greg tidak berhenti pada teknis pertambangan. Papua, baginya, adalah medan moral. “Ketidakpuasan rakyat Papua itu bukan soal ideologi. Tapi karena kesejahteraan tak pernah sampai ke tangan mereka. Ini bukan sekadar kegagalan administratif. Ini kegagalan etis.”

akan konstataasi dari Richard M. Auty, ekonom asal Inggris yang dikenal luas sebagai pencetus konsep “*resource curse*” atau “kutukan sumber daya alam” (*curse of natural resources*). Istilah ini mulai populer setelah ia menerbitkan tulisannya pada tahun 1993, terutama dalam bukunya, “*Sustaining Development in Mineral Economies: The Resource Curse Thesis*”.

“Ia nyata, dan terus menghantui bangsa ini. Tapi kalau ada kepemimpinan nasionalis, keberanian politik, dan ketegasan strategi, kutukan itu bisa kita balikkan jadi rahmat,” kata Syahganda.

Pandangan itu diamini Dr. Sidratatha Muchtar yang menyebut bahwa program hilirisasi di era sebelumnya gagal total. “Hanya menguntungkan asing. Yang disebut hilirisasi itu sesungguhnya hanya mengganti bentuk kolonialisme,” katanya. Ia yakin Presiden Pra-



Dr. Greg Poulgrain, sejarawan Australia

Sebelumnya, Ketua Dewan Direktur GREAT Institute, Dr. Syahganda Nainggolan, membuka forum dengan catatan serius: “Kutukan sumber daya alam bukan mitos,” kata Syahganda mengingatkan semua

bowo memahami hal itu. “Ia tidak inward looking. Ia paham geopolitik. Sekarang saatnya redefinisi. Dan kita harus berhenti menyamakan ‘bebas aktif’ dengan ‘diam’. Indonesia harus bicara di ASEAN. Ha-



rus jadi jangkar. Bukan sekadar peserta.”

Dalam soal Freeport Poulgrain memang pernah menyingkap tabir sejarah yang lebih kelam. Bahwa pembunuhan Presiden John F. Kennedy bukan semata tragedi Amerika, tapi titik balik geopolitik Asia Tenggara. “Kennedy mendukung kemerdekaan negara Dunia Ketiga. Ia ingin mengaudit Freeport. Ia tak suka pendekatan intelijen dan korporasi. Dan setelah ia mati, semuanya berubah. Dulles menang. CIA menang. Freeport masuk,” kata Greg.

Pernyataan ini, menurutnya, bukan teori konspirasi. Ia mengaku menelusuri dokumen yang dulu diklasifikasikan, mewawancarai pelaku sejarah, dan mencocokkannya dengan agenda rahasia pasca-Perang Dunia II. “Apa yang terjadi di Indonesia adalah hasil dari jaringan korporasi, bukan sekadar urusan diplomasi.”

Dr. Indra Kusuma Wardhana menambahkan dimensi mutakhir: perang dagang AS-Tiongkok adalah bab baru dari dominasi lama. “Kita harus bisa navigasi. Kalau tidak, kita akan jadi Vietnam yang dikapitalisa-



si, atau Myanmar yang didikte,” ujarnya. “Indonesia harus memilih: mau jadi panggung atau sutradara?”

Indra, pengajar di Universitas Pertamina, menyatakan Indonesia harus cermat memainkan peran di tengah perang dagang Amerika dan Tiongkok. “Kita tidak boleh hanya jadi pion. Kita harus menjadi aktor. Kita harus bisa menavigasi semua tekanan itu dengan sikap berdiri di atas kaki sendiri,” katanya.

Dr. Teguh Santosa menutup sesi dengan refleksi keras: “Selama distribusi kekayaan tidak adil, konflik

akan selalu menemukan bentuk barunya. Dan tugas kita bukan hanya membaca sejarah, tapi merebut kendali atas masa depan.”

Forum ditutup tanpa tepuk tangan. Hanya diam. Tapi diam yang padat. Diam yang terasa seperti janji tak terucap: bahwa negeri ini harus berhenti jadi panggung dagang darah dan emas.@

DARI KUTUKAN, MENJADI BERKAH

Indonesia diberkahi dengan sumber daya alam yang melimpah. Baik dari keanekaragaman hayati sampai mineral dan migas. Misalkan seperti Jawa Barat yang memiliki potensi panas bumi mencapai 5.411 MW sebagai energi baru terbarukan. Kekayaan sumber daya alam tersebut jelas menjadi perhatian bagi negara-negara untuk dapat menguasainya.

Komoditas rempah seperti pala dan mineral seperti emas telah menjadi komoditas yang terus diperebutkan oleh negara-negara kolonial lebih dari 150 tahun. Ketika Indonesia merdeka, potensi sumber daya alam tersebut menarik perhatian negara-negara adidaya, penemuan tambang emas Grasberg pada tahun 1936 dan berdampak secara politik maupun ekonomi. Keterlibatan perusahaan Amerika dalam sektor pertambangan di Indonesia berdampak terhadap masyarakat lokal dan pemerintah Indonesia terutama tambang Grasberg di Papua yang dikenal sebagai cadangan emas terbesar di dunia.

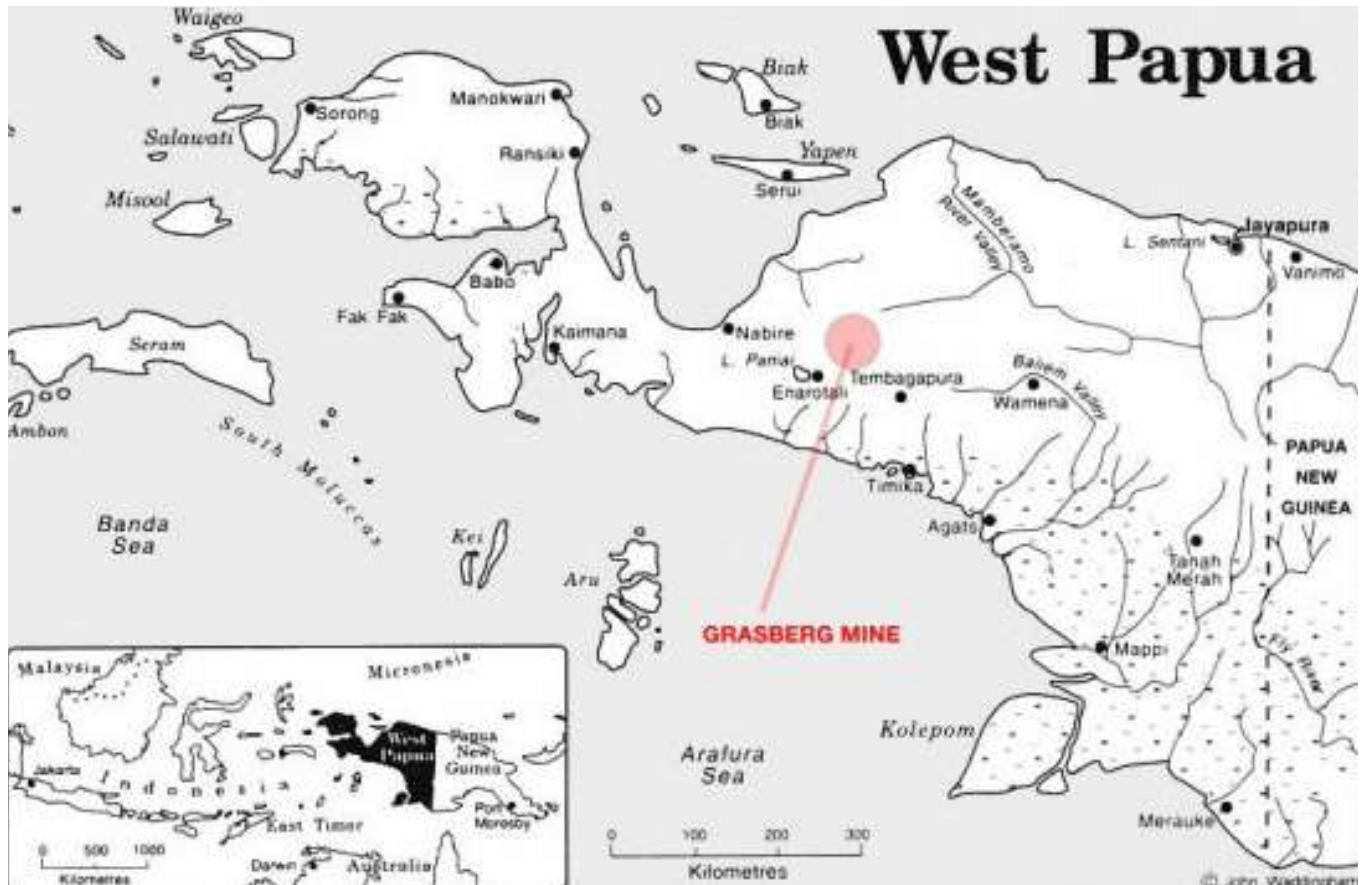
Indonesia menjadi medan perebutan pengaruh antara dua negara adidaya, sehingga pada akhirnya Presiden Soekarno turun dari kepemimpinan digantikan oleh Presiden Soeharto. Kebijakan proteksionis Soekarno digantikan dengan kebijakan yang mendukung masuknya investasi asing. Selama masa transisi ekonomi nasionalistik menuju ekonomi pro-pasar, Marshall Green, Duta Besar AS untuk Indonesia, memiliki peran penting dalam menjembatani diplomasi dan promosi kebijakan tersebut. Sehingga, salah satu bentuk konkrit dari perannya adalah pengelolaan Tambang Grasberg di Papua oleh per-

sahaan asal Amerika Serikat, Freeport.

Pengelolaan tambang emas oleh Freeport tersebut tidak memberi dampak positif terhadap masyarakat sekitar. Rasa ketidakpuasan oleh masyarakat Papua salah satunya muncul karena ketidakadilan dan kegagalan dalam distribusi kesejahteraan hasil dari eksploitasi sumber daya alam Tanah Papua. Isu kerusakan lingkungan dan ketidakadilan sosial yang dialami masyarakat adat. Pentingnya pertanggungjawaban perusahaan dan perlindungan hak masyarakat lokal. Jika ini terus berlanjut, amarah masyarakat Papua bisa semakin besar.

Untuk perkembangan terkini, terkait dinamika geopolitik masa depan, terutama meningkatnya investasi China di sektor sumber daya alam Indonesia. Perlu diperhatikan bahwa kedaulatan atas sumber daya harus dijaga untuk memastikan stabilitas ekonomi nasional dan perencanaan strategis serta kerja sama internasional untuk menghindari eksploitasi lanjutan. Selain itu, Strategi kebijakan luar negeri Amerika Serikat yang erat kaitannya dengan kepentingan ekonomi dan isu HAM sering mengaitkan sumber daya internasional sebagai alat negosiasi politik luar

Tambang Emas dan Tembaga Grasberg di Papua



Tambang emas Grasberg di Papua (Sumber: Mongabay)

negeri. Sehingga Indonesia perlu memahami dimensi politik global dalam konteks pengelolaan sumber daya nasional.

Untuk ke depannya, Indonesia dihadapkan pada tantangan untuk menyeimbangkan investasi asing dengan perlindungan kepentingan nasional. Pene-gakan hukum dan pembagian keuntungan yang adil dalam pengelolaan sumber daya serta peran ASEAN dalam menyelesaikan sengketa perdagangan serta pentingnya diplomasi kawasan menjadi salah satu solusi penyelesaian dari kutukan sumber daya alam ini.

Pada akhirnya, Indonesia harus mengikutsertakan pendekatan sosiologis, dimensi sejarah dan budaya dalam pengelolaan sumber daya. Kebijakan ekonomi harus mempertimbangkan warisan budaya dan keadilan sejarah agar pembangunan berkelanjutan dapat tercapai. Pentingnya pendekatan komprehensif yang mencakup aspek ekonomi, lingkungan, Sejarah dan budaya dalam pengelolaan sumber daya serta visi jangka panjang, kerja sama internasional, dan tata kelola yang bertanggung jawab demi kesejahteraan bangsa, mengubah adagium untuk negara yang kaya Sumber Daya Alam yaitu dari kutukan menjadi berkah, sebuah negeri yang baldatun thoyibatun wa rabbun ghafur.@

TARIK ULUR REPUBLIK: KETIKA DAERAH HANYA JADI PENONTON ANGGARAN



Ketua Dewan Direktur GREAT Institute, Syahganda Nainggolan, membuka forum dengan satu nada murung: banyak kepala daerah mengeluhkan taring otonomi mereka yang tumpul. “Kewenangan perizinan, pengelolaan sumber daya, semuanya ditarik ke pusat.

Bahkan untuk Galian C saja, izin harus dari pusat,” ujar Syahganda. Ia menegaskan bahwa FGD ini bukan sekadar forum diskusi, melainkan upaya serius dari GREAT untuk menghadirkan pemikiran kritis bagi arah baru pemerintahan.

Otonomi daerah hari ini bukanlah kebebasan, tetapi tarik-ulur kekuasaan antara pusat dan daerah. Begitulah kesimpulan samar namun menggigit dari Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan GREAT Institute, bertajuk “Mendorong Pemerataan Lewat Desain Ulang Hubungan Pusat-Daerah di Era Efisiensi Anggaran”, yang digelar di Jakarta, Senin (26/5/2025). Selain diisi para pemikir-praktisi pemerintahan

dari Kementerian Tenaga Kerja; dosen Politeknik Kementerian Hukum dan HAM, Dr M Arief Adillah; Wakil Ketua DPRD Blora, Siswanto; Ketua IAP DKI Jakarta, Ir Adhamaski Pangeran, ST, ME; Ketua GMKI 2010-2020 Korneles Galanjijina; hadir pula beberapa kelompok mahasiswa berbagai universitas dan perguruan tinggi, antara lain, Universitas Bung Karno dan IPDN Jakarta.

Diskusi dibuka moderator Ir Hendry Harmen dengan paparan awal yang mencubit: enam daerah di Pulau Jawa menyumbang lebih dari 56 persen Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, sementara sisanya tercecer dalam ketimpangan pelayanan publik dan ketergantungan fiskal

Focus Group Discussion (FGD)
Mendorong Pemerataan
Lewat Desain Ulang Hubungan Pusat-Daerah di Era Efisiensi Anggaran

Participants:
 Kometa Galanjijina, S. Ip., Ketua GMKI 2010-2020
 Dr. Muhammad Arief Adillah, S.Sos., M.A.P., Dosen Politeknik Hukum Kementerian Hukum dan HAM
 Ratri Isyana, S.Sr., M.A., Ph.D., Dosen Politeknik STIA LAN Jakarta
 Jilal Mardhani, CEO Neraca Ruang
 Dr. Endang Yuniastuti, S.E., M.Si., Koordinator Bidang Fasilitas Kementerian Perekonomian
 H. Riza Falepi, ST, MT., Wakil Ketua DPRD Blora periode 2019-2022
 Siwanto, S.Pd., M.H., Wakil Ketua DPRD Blora periode 2014-2019
 Ir. Adhamaski Pangeran, S.T., M.E., Ketua IAP DKI Jakarta
 Dr. Hefrizal Handra, M.Soc.Sc., Wakil Rektor II Universitas Andalas

Organizers:
 Dr. Bima Arya Sugiarto, S.I.P., M.A., Wakil Menteri Dalam Negeri
 Bursah Zarnubi, S.E., Bupati Kabupaten Lahat
 Zulfikar Arse Sadikin S.I.P., M.Si., Wakil Ketua Komisi II DPRD RI
 Dr. Syahganda Nainggolan, Ketua Dewan Direktur Great Institute

Event Details:
 GREAT Institute, Jalan Terusan Gunungwari Timur No.15, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
 Senin, 26 Mei 2025
 13.00 – 16.30 WIB

seperti Wakil Menteri Dalam Negeri, Dr Bima Arya Sugiarto, Bursah Zarnubi, mantan Walikota Payakumbuh, Riza Falepi; pengajar Politeknik STIA LAN, Ratri Isyana, PhD; CEO Neraca Ruang, Jilal Mardhani; Wakil Rektor Universitas Andalas, Dr Hefrizal Handra; Dr Endang Yuniastuti

terhadap pusat. “Daerah-daerah itu hidup dari dana bagi hasil,” kata Hendry.

Ketua Dewan Direktur GREAT Institute, Dr Syahganda Nainggolan, membuka forum dengan satu nada murung: banyak kepala daerah mengeluh-

kan taring otonomi mereka yang tumpul. “Kewenangan perizinan, pengelolaan sumber daya, semuanya ditarik ke pusat. Bahkan untuk Galian C saja, izin harus dari pusat,” ujar Syahganda. Ia menegaskan bahwa FGD ini bukan sekadar forum diskusi, melainkan upaya serius dari GREAT untuk menghadirkan pemikiran kritis bagi arah baru pemerintahan.

Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, tak menampik ketimpangan itu. Ia menyampaikan pesan Presiden Prabowo dalam sidang kabinet beberapa pekan sebelumnya, saat Presiden menampilkan foto seorang gadis kecil bernama Naila. “Wahai para menteri, mari kita buat Naila-Naila di seluruh Indonesia tersenyum,” kutip Bima. Ia menegaskan, pemerintahan Prabowo anti-liberalisme dan menegaskan diri sebagai sosial demokrat—satu haluan yang dirintis Sutan Sjahrir dan Bung Hatta.

Namun, impian itu akan kandas, kata Bursah Zarnubi, jika struktur negara tetap tersumbat. “Otonomi yang ada sekarang hanyalah otonomi semu. Ekornya masih dipegang pusat,” ujar Bupati Lahat yang juga dikenal sebagai pemikir politik sejak era 1980-an ini. Ia mengutip Gunnar Myrdal yang menyebut kemiskinan desa di Asia sebagai akibat absennya spread effect dari wilayah kota.

“Enam puluh persen program pemerintah ada di tingkat kabupaten/kota, tapi mereka hanya dapat remah. Akibatnya, banyak kepala daerah terjebak godaan korupsi karena tekanan keuangan yang terus-menerus,” katanya. Bursah juga menyebut UU Cipta Kerja sebagai regulasi yang merusak semangat desentralisasi. “Harus dicabut,” kata dia, tegas.

Pernyataan senada datang dari Ratri Istania, Ph.D., dosen STIA LAN Jakarta. Ia mengingat-



Dr. Bima Arya Sugiarto, S.I.P., M.A. Wakil Menteri Dalam Negeri RI

kan bahwa akar otonomi daerah bukan baru tumbuh 1998, melainkan jauh sebelumnya. “Zaman Belanda saja, pemerintah kolonial membuat UU Desentralisasi karena mengurus Hindia dari Den Haag itu tidak masuk akal,” katanya. Tapi otonomi itu, menurutnya, kini dilucuti. Bahkan wacana pemilihan kepala daerah oleh DPRD ingin kembali dihidupkan. “Itu sudah sejarah, jangan diulang.”

Ratri menambahkan, dari 2015 hingga 2019, jumlah dinasti politik meningkat hingga 300 persen. “Dan lima persen dari dinasti itu menaikkan angka kemiskinan,” katanya. Otonomi bukan hanya tentang siapa yang memilih, tetapi bagaimana kekuasaan digunakan.

Sementara itu, Dr. Arief Adillah dari Kementerian Hukum dan HAM mengungkapkan sisi kelam lain otonomi: rendahnya literasi dan lemahnya kapasitas daerah. “Bahkan daerah yang dapat peng-



hargaan literasi nasional, kenyataannya parah,” kata Arief. Ia menyebut lima problem utama otda: kapasitas yang rendah, korupsi, kesenjangan pembangunan, koordinasi yang lemah, dan keterbatasan SDA serta SDM. Ia menyarankan agar lulusan IPDN terlebih dulu ditempatkan sebagai sekretaris desa. “Kelola keuangan dari bawah, dari situ mereka belajar integritas,” katanya.

Namun, satu pernyataan Arief mengundang antusiasme peserta: “Daripada mereka minta merdeka, lebih baik minta daerah otonomi baru (DOB)!” Katanya, saat ini ada 341 usulan DOB: 42 provinsi, 252 kabupaten/kota, dan beberapa daerah istimewa dan khusus.

Tentu saja, semua itu tak bisa dijawab hanya dengan retorika. Seperti kata Bima Arya menutup tanggapannya: “Kita butuh aglomerasi sebagai pusat-pusat pertumbuhan. Tapi ada tantangan: ada 1.065 BUMD, sebagian besar sakit.”

Tito Sulistyo ketua Badan Supervisi OJK, juga menyentil fakta bahwa 70 persen kantor BUMN masih berpusat di Jakarta. “Logikanya di mana? Pertamina harusnya di Kaltim, bukan di Jakarta Pusat. Rajawali harusnya di daerah pusat perkebunan, bukan di bilangan Kuningan.”

Forum ini seperti menyuarakan konsensus diam: bahwa otonomi bukanlah pemberian, melainkan perlawanan terhadap sentralisme yang terus membesar. Seperti ditulis Václav Havel, “*The salvation of this human world lies nowhere else than in the human heart, in the human responsibility*. Keselamatan dunia manusia tidak terletak di mana pun selain di dalam hati manusia, dalam tanggung jawab manusia.”

Dan barangkali, penyelamatan republik ini pun, hanya bisa dimulai dari keberanian para pemimpin daerah untuk bersuara.@

detiknews Home Berita Jabodetabek Internasional

detikNews / Berita

Sufmi Dasco Cerminkan Gaya Baru Pimpinan DPR, Proaktif & Pemadam Krisis

Dea Duta Aulia - detikNews

Kamis, 13 Feb 2025 09:43 WIB



Foto: ANTARA FOTO/Galih Pradipta

Jakarta - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dianggap tukang stempel pemerintah oleh salah satu media nasional karena selalu mengambil langkah menangani isu dan kasus politik kemasyarakatan belakangan ini. Dasco dinilai melakukan beberapa langkah dalam k...

news.detik.com



Procrastination is...
Sponsored • quiz.th...
Learn more

Jumhur Hidayat, Tanggapi Program Makan Bergizi Gratis

521 views 2 wk ago ...more

EBC Media Channel 2.75K
Subscribe

39 Share Remix Download

RMOL BISNIS

Dr. Syahganda Nainggolan: BPI Danantara Terobosan Cepat Prabowo Realisasi Ekonomi Pancasila

LAPORAN: AHMAD SATRIO
Selasa, 25 Februari 2025, 22:35 WIB



Direktur Sabang-Mesuke Circle, Syahganda Nainggolan/Wit

REPUBLICMEROEKA Pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) oleh Presiden

rmolid

RMOL

Mahasiswa Perlu Pahami Prabowo Baru 100 Hari Memerintah

LAPORAN: JONNIS PURBA
Selasa, 18 Februari 2025, 22:03 WIB



Khalid Zabidi/Wit

REPUBLICMEROEKA Aksi demonstrasi mahasiswa dengan tajuk Indonesia Gelap menjadi bentuk luapan ekspresi ketidakpuasan terhadap beberapa kebijakan pemerintah. Aksi mahasiswa digelar di Jakarta dan sejumlah kota di Indonesia...

rmolid

detiknews Home Berita Jabodetabek Internasional

detikNews / Berita

Alih-Alih Fokus Isu Oplosan, Khalid Zabidi Ajak Masyarakat Targetkan Mafia Migas

by admin

Kejaksaan Agung (Kejagung) menangkap 9 tersangka kasus korupsi tata Kelola minyak mentah tahun 2018-2023. Para tersangka adalah pejabat Pertamina dan pihak swasta. Total kerugian negara akibat ulah mafia minyak mentah ini mencapai nyaris Rp1.000 triliun. Kasus ini menghancurkan publik karena...

detiknews Home Berita Jabodetabek Internasional

detikNews / Berita

HUT Ke-52, KSPSI Minta Buruh Dipandang sebagai Aset Penting di Industri

Taufiq Syarifudin - detikNews

Kamis, 27 Feb 2025 15:13 WIB

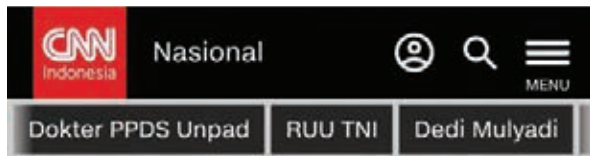


Foto: Lamhol Arlonang/detikcom

Jakarta - Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) menggelar perayaan HUT ke-52 di Indonesia Arena, Kompleks GBK, Jakarta Pusat. Mereka meminta perusahaan memandang buruh sebagai aset.

Ketua Umum KSPSI Jumhur Hidayat





Nasional > Info Politik

Safari Prabowo ke Timur Tengah Diyakini Berdampak Positif bagi Dunia

Info Politik | CNN Indonesia

Selasa, 15 Apr 2025 09:42 WIB



(Foto: CNN Indonesia/Muhammad Naufal)

Jakarta, CNN Indonesia -- Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Uni Emirat Arab (UEA), Turki, Mesir, Qatar dan Yordania membawa beragam agenda politik dan ekonomi, termasuk membangun hubungan politis dan memperkuat Indonesia khususnya di Global South, disebut mendapatkan sambutan hangat.

Ketua Dewan Direktur GREAT Institute, Syahganda Nainggolan, dalam rangkuman Focus Group Discussion (FGD) bertema "Mencermati Arah Politik dan Diplomasi Prabowo di Timur Tengah

okezone
news



Lawatan ke Kawasan Timur Tengah, Prabowo Dinilai Berpeluang Jadi Pemimpin Dunia



Awaludin, Jurnalis

Senin, 14 April 2025 12:25 WIB



Prabowo Dinilai Berpeluang Jadi Pemimpin Dunia (foto: dok ist)

JAKARTA - Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Uni Emirat Arab (UEA), Turki, Mesir, Qatar, dan Yordania dilakukan dalam rangka membangun hubungan politik, dan memperkuat posisi



ANTARA > Ekonomi > Bisnis

Great Institute nilai sikap RI hadapi perang tarif Trump sudah tepat

25 April 2025 06:56 WIB



Direktur Great Institute Syahganda Nainggolan.
ANTARA/HO-Great Institute

Jakarta (ANTARA) - Lembaga riset ekonomi, politik, dan teknologi Great Institute menilai sikap Indonesia dalam



Home > Ekonomi

Hadapi Tarif Trump, Sikap Independen Indonesia Dinilai Sudah Tepat

Cahya Mulyana

24/4/2025 21:39

A- A+



Suasana diskusi Prabowonomics di Era Tariff War, Jakarta, Kamis (24/4). (dok. istimewa)



Menanggapi hal ini, Kepala Desk Energi GREAT Institute, menyarankan agar Presiden Prabowo segera membentuk Direktorat Jenderal Ketenaganukliran. Hal ini dinilai penting untuk menunjang rencana pengembangan reaktor nuklir.

"Pemerintah harus segera membentuk Direktorat Ketenaganukliran untuk mewujudkan rencana mendirikan reaktor nuklir 250 MW sebagai langkah awal dari target 35 GW pada tahun 2032," ujar Turino



Para pembicara dalam diskusi bertajuk: "Politik Energi: Menuju Swasembada Energi Melalui Teknologi Nuklir" di Jakarta, Rabu (30/4/2025). (Suara.com/Fakhri Fuadi)

Dalam kesempatan yang sama, Guru besar ITB, Sidik Permana yang juga salah satu penyintas bencana nuklir Fukushima tahun 2011 silam turut angkat suara. Sidik mengingatkan pemerintah agar tidak hanya melempar wacana.



Q

≡

Home

Politik

Hukum

Hankam

Humaniora

Greg Poulgrain: Ketidakpuasan di Papua Dipicu Kegagalan Distribusi Kesejahteraan



Rico Afrido Simanjuntak

Senin, 05 Mei 2025 - 23:51 WIB



Sejarawan dan Indonesianis Dr Greg Poulgrain menghadiri GREAT Lecture yang diselenggarakan GREAT Institute di kantor lembaga think tank itu di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (5/5/2025). Foto:



≡

Politik

Hukum

Ekonomi

Metro

Sepakbola

ANTARA > Ekonomi > Bisnis

Telaah

Kekayaan Papua versus tantangan pemerataan

Oleh Hanni Sofia

6 Mei 2025 12:24 WIB

WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram

Print

Share



Sejarawan Dr. Greg Poulgrain dalam GREAT Lecture yang digelar di Kebayoran Baru pada 5 Mei 2025 mengatakankeberlimpahan itu sudah semestinya menjadi berkah bagi seluruh rakyat Indonesia, term Papua, yang kekayaannya layak (ANTARA/HO-GRE Lecture)

51

Tribunnews.com LIVE

Sofyan Djalil Komisaris PCO Koperasi Me

Pembangunan Daerah Perlu Otonomi Daerah yang Lebih Luas

Tayang: Senin, 26 Mei 2025 21:42 WIB

Diperbarui: Senin, 26 Mei 2025 22:22 WIB

Penulis: Erik S
Editor: Wahyu Aji

[Baca tanpa iklan](#)

[f](#) [X](#) [WhatsApp](#) [Telegram](#) [in](#)



Istimewa

OTONOMI DAERAH - Focus group

ANTARA

Politik Hukum Ekonomi Metro Sepakbol

ANTARA > Politik

Wamendagri: Penerapan otda harus berpihak pada keadilan sosial

27 Mei 2025 00:27 WIB

[WhatsApp](#) [Facebook](#) [Twitter](#) [X](#) [Telegram](#) [Link](#)



Wamendagri Bima Arya Sugiarto saat membuka acara FGD bersama Great Institute Indonesia dengan tema "Mendorong Pemerataan Lewat Desain Ulang Hubungan Pusat - Daerah di Era Efisiensi Anggaran" di Kantor Great Institute Indonesia, Jakarta, Senin (26/5/2025).

ANTARA/HO-Puspen Kementerian Dalam Negeri



Relawan Muda Prabowo-Gibran: Ini Pertemuan Penting Sebelum Kongres PDIP | Dua Sisi tvOne



MANUEVER DASCO: UNDANG SYAHGANDA, JUMHUR, RG, HINGGA EGGI SUDJANA! INI LIVE DENGAN SYAHGANDA!!



JENDRAL TNI PURN TUNTUT COPOT WAPRES GIBRAN, SYAHGANDA: SEGERA RESHUFLE MENTRI EX JOKOWI !!!



[FULL] JENDRAL KUNTO DICOPOT, SEHARI KEMUDIAN DIRALAT. // AKIBAT MATAHARI KEMBAR?



SYAHGANDA: ZAKEN KABINET PRABOWO GAGAL KARENA ADA DUA MATAHARI



AKTIFIS BERBALIK DUKUNG PRABOWO TAPI DESAK ANTEK JOKOWI DITENDANG. BEDA IDEOLOGI, TAK BISA DISATUKAN

PENUTUP

DARI PIKIRAN KE PERUBAHAN

Sembilan forum pemikiran yang digelar GREAT Institute sebelum peluncurannya bukan sekadar rangkaian acara. Ia adalah testimoni dari satu kenyataan penting: bahwa bangsa ini masih memiliki energi intelektual yang tak bisa diremehkan. Energi yang jenuh dengan kompromi, letih oleh kebijakan setengah hati, dan lapar akan keberanian untuk berpikir jernih demi kemajuan sejati.

Dalam waktu singkat, GREAT telah membuka ruang-ruang diskusi yang selama ini nyaris ditutup oleh birokrasi formal atau kegaduhan politik praktis. Kami menghadirkan diplomat, ekonom, sosiolog, sejarawan, pelaku industri, serta kaum muda untuk duduk dalam meja yang sama—meja tempat gagasan diuji dan arah bangsa dipertanyakan. Kami tidak menawarkan jawaban instan, melainkan pertanyaan-pertanyaan penting yang selama ini dihindari.

Dan kini, dengan peluncuran resmi GREAT Institute, kami menyatakan diri sebagai lembaga pemikir yang tidak ingin menjadi penggembira kekuasaan. Kami tidak akan sibuk menjahit legitimasi bagi keputusan yang keliru. Kami berdiri sebagai mitra kritis bagi pemerintah, rakyat, dan masa depan bangsa.

Kami percaya bahwa kerja intelektual bukan kemewahan, tapi kewajiban. Dan bahwa perubahan tidak pernah datang dari diam. Ia datang dari keberanian memilih posisi, dari kemauan membaca ulang kenyataan, dan dari keyakinan bahwa bangsa besar tidak dibangun oleh kebetulan sejarah, melainkan oleh kesungguhan berpikir dan keberanian bertindak.

Inilah awal dari perjalanan panjang kami. Perjalanan yang akan dipenuhi perdebatan, kesangsian, bahkan resistensi. Tapi juga perjalanan yang akan menegaskan bahwa nalar, bila diperjuangkan dengan keberanian dan konsistensi, masih bisa menjadi fondasi paling kokoh dari Indonesia yang adil, berdaulat, dan tercerahkan.

Kami tidak datang untuk menyenangkan. Kami datang untuk menyadarkan. Dan kami percaya, Anda yang membaca ini, adalah bagian dari jalan panjang yang sama.

GREAT Institute

Jakarta, Mei 2025



GREAT Institute
GREAT THINKING, GREAT NATION

GREAT Institute

Telp : +62 813-2490-8859

Website : www.greatinstitute.id

Email : greatinstituteonline@gmail.com

Alamat : Jalan Taman Gunawarman Timur No.15, Jakarta Selatan 12110.